



# EDUKASI KONSUMEN

EDISI JUNI 2024

[sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)



Sektor Unggulan 2024:  
**Keuangan Hijau  
dan Berkelanjutan**

# Media Sosial **SIKAPI UANGMU**

Mendapatkan penghargaan pada ajang  
**INDONESIA DIGITAL MEDIA AWARDS (IDMA) TAHUN 2024**

**GOLD WINNER**

kategori **Media Sosial**  
Instansi Pemerintah



## 5 Kabar Otoritas

### OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Perempuan Pelaku UMKM

- 20 Edu Perbankan  
Ketahanan Perbankan Nasional Hadapi Tekanan Geopolitik dan Pelemahan Rupiah
- 22 Edu Invest  
Investasi untuk Memenuhi Ibadah Kurban
- 24 Edu IKNB  
Pentingnya Menghitung Ekses Asuransi dalam Perencanaan Keuangan
- 26 Edu Syariah  
OJK Gelar Kampanye Nasional Keuangan Syariah Selama Bulan Ramadan
- 28 Edu Tech  
Perlindungan Data Pribadi Terkait Sosialisasi KTP Digital
- 32 Sosok  
Perkuat Implementasi ESG untuk Menuju Indonesia Emas 2045
- 34 Regulasi  
OJK Dukung Upaya Pemberantasan Aktivitas Judi Online
- 36 Bisnis Pemula  
Strategi Bisnis Kuliner Vegetarian
- 38 Investasi  
Memanfaatkan Produk Investasi untuk Dana Pendidikan
- 40 Konsumen Bicara  
Tabungan Haji dan Modal Ventura
- 41 Telaah Produk  
Kenali Beda *Paylater* dan *Fintech Lending*
- 43 Angka Bicara  
Perkembangan Kinerja Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kuartal 1-2024
- 44 Inspirasi  
Top 10 *Side Hustle* Menjanjikan
- 46 Wacana  
Yuk, Rasakan Manfaat Tabungan Haji untuk Tunaikan Rukun Islam ke-5
- 48 Literasi Keuanganpedia  
Film *Money Explained*, Kenali Lebih Dalam Tentang Uangmu
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini  
Evolusi ATM dari Waktu ke Waktu

## 10 Sorotan Utama II

### OJK Akhiri Restrukturisasi Kredit Perbankan dan Penilaian Kualitas Aset Pembiayaan Sektor PVML

OJK menyatakan bahwa sektor perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19. OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat (*resilient*) dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.



## 18 Perspektif

### Tren Perilaku Konsumen Indonesia 2024

Tren perilaku konsumen seringkali mencerminkan dinamika perubahan sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai dan budaya dalam masyarakat. Seperti apa tren perilaku konsumen Indonesia di tahun naga kayu ini?

## 6 Sorotan Utama I

### Transformasi TKBI dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

OJK melakukan pembaruan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Pembaruan tersebut banyak menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan seperti apa dampaknya pada perekonomian Indonesia?

## 14 Sorotan Utama III

### ATB Terbitkan ASEAN Taxonomy Versi 3

ASEAN Taxonomy Board (ATB) menerbitkan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan versi ketiga untuk sektor transportasi dan penyimpanan (*Transportation and Storage*) serta konstruksi dan real estate untuk mendorong praktik-praktik keuangan berkelanjutan di seluruh kawasan.



## 30 Fokus Global

### Resiliensi Jasa Keuangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hingga kuartal kedua 2024, pertumbuhan ekonomi nasional masih positif yang didukung oleh resiliensi dari berbagai sektor jasa keuangan. OJK optimis kondisi perekonomian dalam negeri tetap stabil seiring pasar keuangan global yang juga terjaga kondusif.

# Ayo, Melangkah Lagi!

**S**etelah terdampak pandemi Covid, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Indonesia mulai pulih. Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menilai saat ini kondisi perbankan kita telah memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

Hal ini ditandai oleh berbagai indikator perbankan Indonesia pada Januari 2024. Rasio kecukupan modal (*CAR*) berada di level 27,54%. Likuiditas kuat, ditandai oleh *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* 231,14% dan *Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD)* 123,42%. Kualitas kredit pun di bawah *threshold* 5%, yakni *NPL Gross* 2,35% dan *NPL Nett* 0,79%. Indikator-indikator ini menyiratkan kinerja perbankan yang cukup kuat dan mampu menahan mitigasi risiko yang solid, meski kondisi perekonomian global masih tidak menentu.

Berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, serta dicabutnya status pandemi Covid-19 pada Juni 2023, menegaskan Pemerintah yakin perekonomian Indonesia telah pulih dari dampak pandemi.

Sejalan dengan situasi yang membaik ini, OJK menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Kebijakan ini merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDG)* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Klasifikasi TKBI ini akan memudahkan pemahaman bagaimana pendanaan digunakan secara ramah lingkungan sehingga mencapai hasil yang berkelanjutan.

Seiring dengan langkah itu, *ASEAN Taxonomy Board (ATB)* juga menerbitkan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan versi ketiga untuk sektor transportasi dan penyimpanan (*Transportation and Storage*) serta konstruksi dan *real estate* untuk mendorong praktik-praktik keuangan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Mulai pulihnya perekonomian dan tercurahnya perhatian untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi hijau ini patut kita syukuri. Ini berarti setelah tersendat beberapa lama, kita mulai dapat melangkah kembali dan mengembangkan ekonomi kita secara berkelanjutan.

## SUSUNAN REDAKSI

### DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar  
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

### DEWAN PENASEHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen)

### PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Aman Santosa (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi), Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

### REDAKTUR AHLI:

Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Edwin Nurhadi (Direktur Inklusi Keuangan), Sekar Putih Djarot (Plt. Kepala Grup Komunikasi Publik); Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah); Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK).

### REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Plt. Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan)

### REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

### ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350  
Telepon: (021) 29600000  
Faksimili: (021) 3866032  
Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

# OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Perempuan Pelaku UMKM

**OJK menggelar perayaan Hari Kartini bersama Perempuan Pelaku UMKM di Jakarta, 23 April 2024. Kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* ini merupakan salah satu bentuk dukungan OJK untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi Perempuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada acara peringatan Hari Kartini Tahun 2024.

Acara peringatan Hari Kartini ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. Friderica menyampaikan bahwa

literasi keuangan yang bagus akan membantu para ibu pelaku UMKM mengelola keuangan yang lebih baik, memilih jalur akses keuangan, dan lebih bijak dalam menilai risiko layanan keuangan yang akan dipilih. Selain itu, perempuan dengan literasi keuangan yang baik juga akan menjadi bekal kuat dalam menciptakan generasi yang tangguh secara finansial.

Tema 'Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan di DKI Jakarta' ini dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, serta Kepala Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara *hybrid* ini diikuti oleh lebih dari

400 pelaku UMKM perempuan dari berbagai wilayah DKI Jakarta secara *offline* bertempat di Aula Serbaguna Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan lebih dari 1.000 peserta hadir secara *online*.

Perempuan memiliki peran yang besar dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dari 66 juta pelaku UMKM yang ada, 64% di antaranya dikelola oleh perempuan. Pentingnya peran perempuan dalam perekonomian ini juga perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang baik.

Pada kesempatan itu, narasumber menyampaikan materi 'Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman *Online* Ilegal', yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan materi 'Pengenalan Kredit Pembiayaan' dari PT PNM, 'Pengenalan Tabungan Emas' dari PT Pegadaian dan pembekalan 'Perencanaan Keuangan' oleh *Certified Financial Planner*.





# Transformasi TKBI dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

**OJK melakukan pembaruan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Pembaruan tersebut banyak menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya TKBI dan seperti apa dampaknya pada perekonomian Indonesia?**

**S**ebagai respon dari dinamika dan perkembangan keuangan berkelanjutan nasional dan internasional serta menjawab berbagai tantangan penanganan dan pembiayaan perubahan iklim, implementasi transisi menuju *net zero emission* (NZE) serta upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), OJK menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan TPB/SDGs yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. Sederhananya, transformasi TKBI tersebut akan mempermudah pemahaman bagaimana pendanaan digunakan dengan cara yang ramah lingkungan. TKBI akan membantu mengarahkan modal swasta tersalurkan ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat

“

Dalam taksonomi keuangan berkelanjutan kita melihatnya secara lebih komprehensif jadi melihat prioritas terkait dengan pengurangan emisi karbon tadi itu dalam konteks yang lebih luas bagian dari lingkungan hidup, tetapi juga secara berimbang memperhatikan aspek kemajuan sosial, dan pembangunan ekonomi.

bagi lingkungan dalam jangka panjang.

TKBI disusun dengan menekankan prinsip ilmiah, kredibilitas, dan interoperabilitas untuk mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Isinya mengacu pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya. Penyusunannya mengadopsi poin-poin yang tertuang dalam tujuan pengelolaan lingkungan hidup (*Environmental Objective*) dan *Essential Criteria* (EC).

Agar lebih mudah dipahami teknisnya, OJK menerbitkan TKBI ini dalam wujud buku saku sebagai panduan bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) menilai aktivitas ekonominya masuk ke dalam kategori merah, kuning, atau hijau. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana proses penilaiannya. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas, yaitu *Technical Screening Criteria* (TSC) untuk segmen korporasi/non-UMKM. SJK dapat melihat hasil akhir dari proses penilaiannya yang diklasifikasikan menjadi “Hijau” atau “Transisi”. Jika hasilnya tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas ekonomi SJK dianggap “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

Ruang lingkup TKBI mencakup *Nationally Determined Contributions* (NDC) serta perubahannya. Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor yaitu *Energy, Waste, Proses Industri dan Penggunaan Produk/Industry Processes and Product Use* (IPPU), serta Pertanian,

Kehutanan, dan Penggunaan lahan lainnya – dikenal sebagai AFOLU. Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan *NDC related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya.

Ke depannya sejalan dengan sifat *living document*, TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

#### **Fokus Transformasi TKBI**

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar mengatakan alasan transformasi *green* taksonomi menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan adalah perubahan pada fokus utamanya yakni mengurangi emisi karbon.

“Dalam taksonomi keuangan berkelanjutan kita melihatnya secara lebih komprehensif jadi melihat prioritas terkait dengan pengurangan emisi karbon tadi itu dalam konteks yang lebih luas bagian dari lingkungan hidup, tetapi juga secara berimbang memperhatikan aspek kemajuan sosial, dan pembangunan ekonomi,” ujar Mahendra.

Pembaruan THI menjadi TKBI tersebut, merupakan respon atas perkembangan komitmen iklim global sehingga fokus utama memang menepis dampak buruk krisis iklim

dan memastikan transisi energi berjalan lancar. Sebagai informasi, saat ini di berbagai wilayah di dunia mengalami perubahan iklim ekstrim, di mana suhu udara mencapai angka yang tidak nyaman bagi manusia untuk beraktivitas normal. Bahkan menyebabkan kematian di beberapa negara. Ini artinya, perubahan iklim yang ekstrim benar-benar menimbulkan dampak yang sangat berisiko tinggi.

Karena itu, OJK menilai perlu ada langkah tegas untuk mempercepat penerapan ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan. Sektor awal yang dikembangkan dalam taksonomi berkelanjutan adalah sektor energi dengan tujuan utama mendorong transisi energi di Indonesia. Terdapat beberapa aktivitas usaha di sektor ini yaitu pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan serta aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU (*early retirement*). Peran aktivitas *upstream* dan *mid-stream* global juga dipertimbangkan, mengingat kegiatan tersebut mendorong transisi energi dan target dekarbonisasi di Indonesia.

Pilihan untuk lebih dulu fokus ke sektor energi dipertimbangan OJK sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kawasan. OJK juga memandang energi fosil (batubara) masih memiliki peran penting dan akan dimanfaatkan sebagai sumber energi sementara. Aktivitas dari mineral kritis adalah satu dari dua fokus yang dibahas dalam taksonomi berkelanjutan untuk sektor energi, di samping pengadaan listrik,

gas, uap/air, panas, dan udara dingin.

Mahendra menyampaikan, diperlukan suatu ekosistem yang lengkap untuk bisa menerbitkan suatu taksonomi. Artinya, OJK tidak hanya mengukur kesiapan dari sektor keuangannya saja, tetapi juga dari aspek sektoral termasuk kebijakan terkait yang mendukung terhadap langkah untuk menuju nol emisi karbon. "Selain bagian yang memprioritaskan aspek transisi energi, di dalam taksonomi yang pertama ini, juga menyoroti sumber daya kritikal atau yang disebut dengan *critical mineral*. *Critical mineral* ini sesuai dengan standar dan juga taksonomi yang berlaku di negara lain dianggap sebagai pendukung utama dari keberhasilan energi itu sendiri," kata Mahendra melanjutkan.

Berdasarkan penjelasan TKBI, OJK mengacu kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM), mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE (*green metals*) mencakup aluminium, galena, kobalt, tembaga, besi, mangan, nikel, seng, silika, lithium, logam tanah jarang, platinum, kadmium, galium, dan tellurium.

Dalam hal ini, TKBI berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip kredibilitas dalam penyusunan taksonomi. Ada beberapa hal yang diperhatikan meskipun sejumlah sektor penggalian dan pertambangan mineral kritis itu masuk dalam kategori pembiayaan berkelanjutan.

Sementara untuk aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya akan dikaji lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembahasan di tingkat nasional maupun global serta memperhatikan berbagai upaya yang telah/ sedang dilakukan oleh

”

Selain bagian yang memprioritaskan aspek transisi energi, di dalam taksonomi yang pertama ini, juga menyoroti sumber daya kritikal atau yang disebut dengan *critical mineral*. *Critical mineral* ini sesuai dengan standar dan juga taksonomi yang berlaku di negara lain dianggap sebagai pendukung utama dari keberhasilan energi itu sendiri.



industri pertambangan dan penggalian dalam rangka mendorong upaya berkelanjutan dan pengurangan emisi.

### Dampak TKBI pada Proses Bisnis Industri dan Upaya Mendorong Ekonomi Hijau

Pro kontra terhadap transformasi TKBI memang terjadi dan masih dalam kategori wajar. Regulator yang berwenang dalam hal ini adalah OJK, tetap terus berupaya mengharmonisasikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial sebagai wujud implementasi ekonomi hijau. Lebih spesifik, OJK berusaha memperbarui kebijakannya melalui TKBI untuk menjadi sarana mencegah manipulasi informasi yang dilakukan oleh “perusahaan nakal” yang menyatakan telah melakukan atau menemukan solusi untuk mengatasi krisis akibat perubahan iklim walaupun kenyataannya tidak pernah dilakukan. Selain itu, dengan terbitnya TKBI ini, Indonesia juga telah memiliki standar klasifikasi keberlanjutan yang berkualitas tinggi yang dapat mencegah praktik *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing*.

Upaya Indonesia untuk berkontribusi terhadap transisi hijau dan meningkatkan nilai sumber daya mineral agar bermanfaat bagi perekonomian patut mendapat perhatian. Namun, tantangan dalam penerapannya juga perlu diantisipasi. Misalnya pada kasus, pengklasifikasian pembangkit listrik tenaga batubara sebagai “ramah lingkungan” yang berpotensi melemahkan kredibilitas TKBI itu sendiri. Bahkan berisiko menimbulkan keraguan terkait komitmen pemerintah terkait perubahan iklim. Isu ini bisa menjadi sangat serius. Sebab investor yang tunduk pada berbagai standar internasional mungkin menganggap klasifikasi TKBI dinilai bermasalah.

Dalam kasus lain, tantangan penerapan TKBI juga terlihat pada

konsumen akhir mineral, terutama di sektor kendaraan listrik (EV), baterai, dan penyimpanan energi yang semakin mengkhawatirkan karena jejak karbon dari bahan yang mereka gunakan. Selain itu, sosialisasi tentang TKBI mungkin juga akan menimbulkan risiko tambahan terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan, baik bagi investor maupun bagi masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Linda Rosalina, merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya OJK diharapkan dapat menetapkan sanksi dan insentif bagi pengguna TKBI untuk memastikan kepatuhan dan mendorong transisi menuju praktik ekonomi yang berkelanjutan. Termasuk memberlakukan pembatasan pembiayaan berdasarkan klasifikasi aktivitas ekonominya.

“Pengkianan taksonomi semestinya memang untuk memberikan progres positif terhadap upaya mendorong ekonomi hijau. Sehingga regulator harus memberikan detail informasi yang *clear* untuk meminimalkan multitafsir, *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing*”, kata Linda.

Lebih lanjut, Linda juga mengajak masyarakat aktif menerapkan perilaku konsumsi hijau, di antaranya yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Masyarakat juga diminta aktif memberikan informasi pelanggaran dalam penerapan TKBI melalui *platform* yang telah disediakan. “Masyarakat harus diberi akses untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi atas dampak negatif lingkungan dan sosial dari aktivitas ekonomi para pelaku industri”, ujar Linda.



### APA MANFAAT PEMBARUAN TKBI BAGI UMKM/MASYARAKAT?

- Dengan terbukanya peluang bagi UMKM untuk menggunakan TKBI, maka UMKM akan memperoleh kesempatan mendapatkan alternatif sumber pendanaan berkelanjutan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di samping sumber pendanaan/ investasi pada umumnya.
- UMKM/masyarakat turut berkontribusi untuk mendukung upaya berkelanjutan pada sektor-sektor yang mendukung transisi energi.
- Masyarakat memiliki akses langsung untuk mengadakan keluhan terkait dampak negatif lingkungan dan sosial dari suatu aktivitas ekonomi.
- Dari aspek sosial, TKBI mengatur tentang pekerja anak oleh pelaku usaha sehingga melindungi hak-hak dan keselamatan pekerja anak.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terkait lingkungan hidup.



## OJK Akhiri Restrukturisasi Kredit Perbankan dan Penilaian Kualitas Aset Pembiayaan Sektor PVML

OJK menyatakan bahwa sektor perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19. OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat (*resilient*) dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

**O**JK menyatakan bahwa industri perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak

Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023, serta

mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil.

Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan *countercyclical* dan merupakan kebijakan yang sangat penting (*landmark policy*) dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi.

OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat (*resilient*) dalam menghadapi dinamika perekonomian

dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal tersebut juga didukung oleh pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi. Sejalan dengan hal itu, sejak diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2023 pada Juni 2023 yang menyatakan status pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir, aktivitas ekonomi masyarakat terus meningkat.

Berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik; tercermin dari Rasio Kecukupan Modal/ *Capital Adequacy Ratio* di level 27,54%, kondisi likuiditas yang ditunjukkan oleh *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 231,14% dan Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/ NCD) sebesar 123,42% serta tingkat rentabilitas yang memadai. Hal ini diharapkan dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah *threshold* 5% yaitu *NPL Gross* sebesar 2,35% dan *NPL Nett* sebesar 0,79%.

### **OJK Memberi Kontribusi Nyata**

Kebijakan di sektor perbankan yang diterapkan OJK telah memberikan kontribusi yang nyata, khususnya melalui Kebijakan Stimulus Covid-19, dalam menopang tekanan terhadap perekonomian sejak awal pandemi melanda hingga saat ini.

POJK Stimulus merupakan kebijakan perintis di sektor keuangan sebagai reaksi cepat (*quick response*) OJK yang bersifat *countercyclical* dalam bentuk stimulus terhadap debitur yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak Covid-19 antara lain melalui restrukturisasi kredit.



## Sorotan **Utama II**

Kebijakan stimulus yang diterbitkan oleh OJK diawali dengan POJK No.11/POJK.03/2020 pada Maret 2020, bertujuan untuk memberikan ruang bernafas kepada debitur yang berkinerja baik namun mengalami dampak pandemi Covid-19.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta mempersiapkan industri perbankan untuk kembali pada kondisi normal secara terkendali (*soft landing*), OJK memperpanjang kebijakan stimulus tersebut sampai dengan 31 Maret 2022 melalui penerbitan POJK No.48/POJK.03/2020, namun dengan penerapan aspek manajemen risiko yang lebih ketat (*stringent*). Hal ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari *moral hazard*.

Pada 10 September 2021, melalui POJK No. 17/POJK.03/2021, OJK kembali memperpanjang kebijakan stimulus untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan sampai dengan 31 Maret 2023.

Dalam perjalanannya, pada November 2022, OJK menilai bahwa perekonomian domestik mulai pulih, namun masih terdapat segmen dan sektor ekonomi yang dinilai masih memerlukan waktu untuk pemulihan. Oleh karena itu, OJK mengambil kebijakan memperpanjang stimulus lanjutan hingga 31 Maret 2024 yang mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (*targeted*) melalui KDK No.34/KDK.03/2022. Kebijakan tersebut tetap disertai dorongan kepada perbankan untuk membentuk cadangan (*buffer*) yang memadai dalam memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

### **UMKM Penerima Stimulus Restrukturisasi Kredit Terbesar**

Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit ini telah mencapai Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total *outstanding* Rp348,8 triliun.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tren kredit restrukturisasi terus mengalami penurunan baik dari sisi *outstanding* maupun jumlah debitur. Pada Januari 2024, *outstanding* kredit restrukturisasi Covid-19



telah menurun signifikan menjadi sebesar Rp251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu debitur.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam yaitu dengan melihat kesiapan industri perbankan, kondisi ekonomi secara makro dan sektoral, serta menjaga kepatuhan terhadap standar internasional.

Berdasarkan evaluasi dan laporan uji ketahanan perbankan menjelang berakhirnya stimulus, potensi kenaikan risiko kredit/*non-performing loan* (NPL) dan ketahanan perbankan diproyeksikan masih terjaga dengan sangat baik.

*Outstanding* kredit restrukturisasi Covid-19 perbankan terus mengalami penurunan namun tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk bank terus meningkat, melebihi periode sebelum pandemi. Kondisi ini merupakan cerminan kesiapan perbankan yang dinilai telah kembali pada kondisi normal secara terkendali (*soft landing*) mengakhiri periode stimulus.

Di sisi lain, seiring dengan pandemi yang mereda dan pencabutan status pandemi oleh Pemerintah, perekonomian Indonesia di hampir seluruh sektor juga kembali pulih dengan pertumbuhan 5,04% pada tahun 2023.

Dian menambahkan bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kebijakan stimulus OJK yang merupakan kebijakan sangat penting (*landmark policy*) dalam menjaga ketahanan sektor perbankan selama masa pandemi, berakhir sesuai dengan masa berlakunya. Kontribusi ini merupakan kisah keberhasilan (*success story*) kontribusi signifikan sektor perbankan menopang perekonomian nasional melewati periode pandemi.

Untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, bank tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19 yang sudah berjalan. Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan normal yang berlaku yaitu POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

### **Berakhirnya Stimulus Covid-19 Terkait Penilaian Kualitas Aset Pembiayaan Sektor PVML**

OJK pun mengeluarkan pernyataan bahwa sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024.

Pemberian stimulus Covid-19 untuk perusahaan sektor jasa keuangan non bank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 55/KDK.05/2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (KDK Perlakuan Khusus) yang

merupakan kebijakan stimulus bagi pembiayaan debitur *targeted* yang berstatus sebagai restrukturisasi Covid-19.

KDK Perlakuan Khusus ini merupakan kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

KDK Perlakuan Khusus merupakan kebijakan untuk memperpanjang stimulus Covid-19 lanjutan hingga 17 April 2024 khusus guna mendukung segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menyatakan bahwa dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah melakukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro dan sektoral serta kesiapan sektor PVML, khususnya mengenai kenaikan risiko kredit dan daya tahan sektor PVML yang diproyeksikan masih dalam kondisi yang baik.

Berakhirnya kebijakan stimulus terkait penilaian kualitas aset bagi debitur dengan UMKM tersebut telah konsisten mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi serta pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023.

Berdasarkan asesmen indikator kesehatan keuangan pada Februari 2024, sektor PVML di Indonesia dinilai dalam kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari tren piutang pembiayaan restrukturisasi yang terus mengalami penurunan dari sisi *outstanding* dan peningkatan dari sisi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh sektor PVML.

Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, industri PVML tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19 yang sudah berjalan dengan menggunakan ketentuan kualitas aset yang berlaku pada masing-masing jenis industri PVML dalam mengantisipasi penurunan kualitas aset.

OJK akan secara konsisten melakukan tindakan pengawasan (*supervisory action*) untuk memastikan kesiapan masing-masing industri PVML dalam melaksanakan proses mitigasi risiko dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya.

# ATB Terbitkan Taxonomy ASEAN Versi 3

ASEAN Taxonomy Board (ATB) menerbitkan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan versi ketiga untuk sektor transportasi dan penyimpanan (*Transportation and Storage*) serta konstruksi dan *real estate* untuk mendorong praktik-praktik keuangan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Taksonomi ASEAN mengadopsi *multi-tiered framework* yang memungkinkan penilaian aktivitas berkelanjutan baik menggunakan pendekatan *principles-based* melalui *Foundation Framework*, maupun *Plus Standard* dengan metodologi yang lebih rinci menggunakan *technical screening*

*criteria* (TSC).

Setelah menerbitkan TSC untuk sektor Energi pada Taksonomi ASEAN Versi 2, Taksonomi ASEAN Versi 3 memperkenalkan TSC untuk dua sektor fokus lainnya, yaitu *Transportation & Storage* (T&S) dan *Construction & Real Estate* (C&RE). Kedua sektor ini mencakup aktivitas seperti

konstruksi dan renovasi bangunan, pembongkaran dan persiapan lokasi, dan akuisisi dan kepemilikan bangunan, serta transportasi perkotaan dan angkutan barang, dan infrastruktur untuk transportasi darat, air, dan udara.

Klasifikasi “Green” untuk kedua sektor ini telah diselaraskan dengan kebijakan dan peraturan sektoral yang relevan (misalnya, strategi *International Maritime Organization*

“Amber” berfungsi sebagai kategori transisi, memberikan “batu loncatan” bagi perusahaan untuk belajar dan melakukan penyesuaian terhadap aktivitas mereka untuk mencapai dan beralih ke klasifikasi “Green”.

Selain TSC baru untuk sektor T&S dan C&RE, Taksonomi ASEAN Versi 3 juga mencakup penyempurnaan pada Lampiran (Annex) untuk memberikan kejelasan yang lebih baik

- *Annex 5*: Pengkinian daftar peraturan sosial nasional untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
- *Annex 6*: Pengkinian daftar peraturan lingkungan hidup nasional untuk Indonesia dan Malaysia.

Noorrafidah Sulaiman, Ketua ATB, menekankan pentingnya pencapaian ini: “Penerbitan Taksonomi ASEAN Versi 3 ini menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya kolektif kita untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan praktik investasi yang bertanggung jawab di kawasan ASEAN. Penerbitan TSC untuk T&S dan C&RE menggarisbawahi komitmen kami yang tak tergoyahkan untuk mendorong keberlanjutan. Kami berharap dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan ketelitian dan kepraktisan Taksonomi ini.”

ATB berharap versi terbaru ini akan memberikan kejelasan yang lebih baik bagi para pengguna Taksonomi ASEAN. Selanjutnya, sesuai dengan aspirasi ASEAN untuk memfasilitasi transisi yang adil dan teratur, Taksonomi ASEAN akan terus ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang terus berkembang. Setelah penerbitan ini, ATB akan melakukan *targeted consultations* dengan para pemangku kepentingan utama dan pengguna Taksonomi ASEAN. Pendekatan ini memastikan Taksonomi ASEAN tetap kokoh, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan komunitas ASEAN yang terus berkembang. TSC untuk sektor fokus lainnya dan *enabling sectors* yang tercakup dalam Plus Standard akan diterbitkan tahun depan.

Sebagai *principal representative* Indonesia di ATB, OJK secara aktif menyuarakan kepentingan nasional dalam penyusunan Taksonomi ASEAN



(IMO) 2023 GHG Emissions, sertifikasi bangunan Hijau Internasional), untuk memastikan bahwa Taksonomi ASEAN tetap kredibel, *interoperable*, dan inklusif. Klasifikasi “Green” mengacu pada taksonomi internasional yang digunakan secara luas seperti EU Taxonomy, dan jika relevan disesuaikan dengan kondisi unik ASEAN. Klasifikasi

bagi pengguna. Perubahan tersebut meliputi:

- *Annex 2*: Penjelasan tambahan dan contoh untuk *Life Cycle Assessment (LCA)* checklist.
- *Annex 3*: Penjelasan tambahan dan contoh untuk *Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA)* checklist.

Versi 3. OJK memimpin koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan perwakilan industri terkait dalam memberikan masukan pada rapat-rapat di ATB.

Sejalan dengan terbitnya Taksonomi ASEAN Versi 3, OJK akan melanjutkan pengembangan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sektor T&S, C&RE, dan sebagian sektor *Agriculture, Forestry and Other Land Use* (AFOLU). Adapun pengembangan akan dilakukan mulai Triwulan II-2024 dan ditargetkan terbit pada awal tahun 2025. OJK akan berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/ lembaga sektoral, perwakilan industri dan pemangku kepentingan terkait lainnya. TKBI menggunakan Taksonomi ASEAN sebagai referensi utama untuk menjaga prinsip *credible*, *interoperable* dan inklusif, dengan tetap memperhatikan perkembangan kebijakan dan kepentingan nasional.

### **Taksonomi ASEAN dan Perannya pada Investasi Indonesia**

Sebagai salah satu lembaga yang menaungi pelaku profesi sektor keuangan, *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW) menyadari pentingnya penerapan kebijakan Taksonomi ASEAN di Asia Tenggara.

Dimulainya penerapan kebijakan ini menunjukkan komitmen kawasan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi, dan integrasi regional. Komitmen ini tentunya perlu didorong dengan terciptanya penerapan kerangka kerja taksonomi yang kuat. Karena itu, ICAEW secara aktif mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan positif di berbagai sektor, terutama dalam pertumbuhan berkelanjutan.

Taksonomi ASEAN sendiri adalah panduan yang dirancang untuk memungkinkan transisi yang adil menuju adopsi keuangan berkelanjutan oleh negara anggota ASEAN. Panduan ini menyediakan keselarasan prinsip-prinsip dasar dan membantu menyelaraskan klasifikasi kegiatan dan aset berkelanjutan di seluruh ASEAN.

Sebelumnya pada 10 November 2021, Taksonomi ASEAN versi pertama diluncurkan bersamaan dengan rangkaian *Conference of The Parties* (COP) ke-26 yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia.

Kemudian pada 27 Maret 2023, Taksonomi ASEAN versi kedua juga turut dirilis kepada publik. Versi baru ini akan berfokus pada klasifikasi kegiatan yang melibatkan kombinasi sumber daya untuk menghasilkan

barang atau jasa, dengan penekanan khusus pada sektor energi.

Versi kedua memperkenalkan metodologi yang lebih rinci untuk menilai kegiatan ekonomi dan juga memungkinkan penilaian kualitatif terhadap aktivitas ekonomi dengan kerangka yang menjaga proses keuangan berkelanjutan oleh negara ASEAN secara adil dan bertahap. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk versi ini direncanakan berlangsung pada kuartal kedua 2023 bersamaan dengan pengembangan *technical screening criteria* (TSC) untuk sektor-sektor tambahan pada tahun 2023 hingga 2024.

Mengingat penerapan taksonomi yang komprehensif membutuhkan kolaborasi dan pengembangan



kapasitas di antara negara-negara anggota ASEAN, tentunya dibutuhkan usaha serta kolaborasi nyata dari jajaran pemerintahan negara ASEAN untuk memastikan taksonomi berjalan mulus.

Namun, lahirnya kebijakan Taksonomi ASEAN belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak, terutama terkait peran dan tujuan dari penerapan yang sudah digaungkan pemerintah. Lantas, seperti apa peran dan tujuan terciptanya Taksonomi ASEAN?

ASEAN menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Taksonomi yang dirancang dengan baik memungkinkan identifikasi dan promosi investasi yang ramah lingkungan.

Taksonomi ini memberikan kejelasan bagi investor, lembaga keuangan, dan bisnis dengan mendefinisikan apa saja yang memenuhi syarat sebagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan. Dengan menyelaraskan investasi dengan proyek-proyek berkelanjutan, ASEAN dapat menarik lebih banyak modal hijau, mempercepat adopsi teknologi bersih, dan memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan.

Mempromosikan perlindungan lingkungan dan aksi iklim kerangka kerja taksonomi di ASEAN memainkan peran penting dalam mempromosikan perlindungan lingkungan dan aksi iklim. Dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk kegiatan yang

ramah lingkungan, kerangka kerja ini memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk menetapkan target dan mengembangkan strategi untuk mengurangi jejak ekologi yang akan terjadi.

Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, dan melindungi ekosistem. Selain itu, taksonomi ini mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh taksonomi tersebut.

Kerangka kerja Taksonomi ASEAN juga memfasilitasi integrasi regional dengan menciptakan bahasa yang sama untuk keberlanjutan. Dengan mengadopsi taksonomi yang diselaraskan di seluruh negara anggota, ASEAN mempromosikan standar pelaporan dan pengungkapan yang konsisten.

Standarisasi ini membantu bisnis untuk menavigasi investasi, perdagangan, dan kolaborasi lintas batas dengan lebih efisien. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan, yang pada akhirnya mendorong kerja sama ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara ASEAN.

Komitmen ASEAN terhadap pembangunan berkelanjutan dan integrasi regional harus didukung oleh penerapan kerangka kerja taksonomi yang kuat. Dengan penerapan taksonomi ini, maka akan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak. ICAEW berkomitmen untuk terus mendorong dan mendukung upaya kolektif yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk membuka jalan dalam menciptakan tanah air yang lebih hijau, lebih tangguh, dan Sejahtera.





# Tren Perilaku Konsumen Indonesia 2024

Tren perilaku konsumen seringkali mencerminkan dinamika perubahan sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai dan budaya dalam masyarakat. Seperti apa tren perilaku konsumen Indonesia di tahun naga kayu ini?

**2**024 merupakan tahun yang menarik untuk menilik perilaku konsumen Indonesia. Pasalnya, pasca pandemi, terjadi transformasi dalam perilaku belanja konsumen. Meskipun pandemi memicu lonjakan belanja *online* secara signifikan, namun belanja *offline* tetap menjadi pilihan yang melengkapi pengalaman belanja konsumen dan bahkan terus bertumbuh setelah pandemi. Fakta di lapangan memperlihatkan dinamika yang kompleks antara ritel *online*

dan *offline*, mengungkapkan bahwa keduanya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Berbeda dari persentase aktivitas belanja *online* yang mengalami sedikit penurunan, konsumen yang lebih memilih aktivitas belanja *offline* setelah masa pandemi berakhir mengalami kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren belanja *online* cukup populer, konsumen Indonesia juga masih tetap gemar berbelanja *offline*.

Dari kacamata konsumen, kehadiran toko *offline* dan *online* tentunya bisa mengakomodasi preferensi belanja yang beragam. Secara umum, konsumen Indonesia biasanya telah memiliki preferensi masing-masing saat berbelanja produk tertentu. Sebuah perusahaan riset dan *database* terkemuka asal Indonesia mengungkap hasil riset mengenai faktor pendorong yang membuat konsumen memilih melakukan pembelian baik secara *online* maupun *offline*.

Alasan kepraktisan dan harga mendominasi jawaban responden untuk belanja *online*. Konsumen akan mempertimbangkan setiap rupiah yang dikeluarkan, jadi membeli produk murah harus tetap bernilai dan mengurangi biaya tambahan saat belanja. Sementara, alasan *tangibility* atau kesempatan untuk memegang/ merasakan produk secara langsung adalah faktor utama yang membuat konsumen lebih memilih berbelanja secara *offline*.

Selain perilaku belanja *online* dan *offline* yang seimbang, tren perilaku konsumen Indonesia juga menunjukkan pentingnya pengalaman belanja

yang dipersonalisasi, terintegrasi dengan teknologi, dan berkelanjutan. Konsumen mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi, baik saat menggunakan aplikasi, *website*, atau berbelanja di toko fisik.

Konsumen muda (Gen Z), khususnya, tertarik dengan integrasi teknologi dalam pengalaman belanja mereka. Misalnya, mereka lebih tertarik membeli produk kosmetik dengan mencocokkan warna dasar wajah menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) atau teknologi kecerdasan buatan secara *online* daripada menguji coba langsung di toko. Alternatif lain, mereka mencari referensi produk dari ulasan oleh *influencer* di media sosial.

Konsumen saat ini juga tidak hanya menginginkan pengiriman yang cepat namun menuntut praktik keberlanjutan dari merek yang mereka dukung. Mereka semakin sadar akan dampak lingkungan dari kebiasaan belanja

mereka dan memilih untuk mendukung merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Terhusus merek-merek lokal yang sudah mengusung konsep *go green*.

Secara umum, hasil survei konsumen per Maret 2024 oleh Bank Indonesia, mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada zona optimis (>100) sebesar 123,8, lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya, 123,1 (Februari 2024). Menguatnya keyakinan konsumen semakin memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE): saat Ini IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat masing-masing sebesar 113,8 dan 133,8.





# Ketahanan Perbankan Nasional Hadapi Tekanan Geopolitik dan Pelemahan Rupiah

Sektor perbankan di Tanah Air tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah, seiring dengan tren era suku bunga tinggi di tingkat global, pelemahan rupiah, ancaman inflasi, dan ketegangan geopolitik yang diperkirakan masih akan berlanjut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa risiko yang dihadapi industri perbankan nasional saat ini akibat penguatan dolar Amerika Serikat beberapa waktu ini masih dapat dimitigasi dengan baik. Berdasarkan hasil uji ketahanan (*stress test*) yang dilakukan OJK, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap permodalan bank, mengingat posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia yang masih jauh di bawah *threshold* (ambang batas) dan secara umum dalam posisi PDN “*long*” (aset valas lebih besar dari kewajiban valas).

Sementara itu, tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga komoditas energi

dan mineral utama serta kenaikan biaya logistik seiring terganggunya jalur perdagangan utama akibat konflik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina.

Cadangan permodalan perbankan yang cukup besar diyakini mampu menyerap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun suku bunga yang masih tertahan relatif tinggi. Porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing saat ini sekitar 15% dari total DPK Perbankan. Sampai akhir Maret 2024, DPK valas masih tumbuh cukup baik secara tahunan (YoY) maupun dibandingkan dengan awal tahun 2024 (Ytd).

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini juga dapat memberikan efek positif terhadap ekspor komoditas dan turunannya yang diharapkan dapat mengimbangi penarikan dana non-residen dan mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam proses produksinya. Sehingga menghadapi kondisi ini, masyarakat diimbau dapat ikut melakukan gerakan penguatan rupiah.

Caranya dengan konsisten membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap pembelian produk

impor. Berwisata dan nikmatilah segala objek wisata di dalam negeri. Gunakan sarana transportasi publik dengan memakai uang rupiah. Bagi masyarakat yang memiliki dolar Amerika Serikat, diharapkan tidak menimbunnya dan segera mungkin menukarkannya dengan rupiah serta tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan IV-2023 yaitu laporan OJK yang memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global dan domestik serta kaitannya dengan perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan atau pembiayaan, serta profil risiko yang dihadapi oleh perbankan, ekonomi domestik tumbuh relatif kuat sebesar 10,38% (YoY) meskipun melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit untuk tujuan konsumtif dan kredit kepemilikan properti menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 7,55% (YoY) pada Desember 2022 menjadi 12,00% (YoY) di Desember 2023. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor juga masih bertumbuh sebesar

13,34% (YoY). Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit menjelang berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024. Untuk itu perbankan didorong meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* CKPN secara memadai, serta secara rutin melakukan *stress test*.

Dari sisi konsumen juga perlu memahami kondisi global agar dapat menentukan keputusan keuangan yang tepat. Dalam hal kredit konsumtif misalnya, konsumen harus mampu mempertimbangkan tingkat suku bunga kredit agar kredit yang diajukan tidak membebani keuangan. Sementara itu, keputusan mengajukan kredit properti perlu mempertimbangkan perubahan pendapatan di masa depan, sehingga konsumen mampu membayar cicilan beserta bunga kredit jangka panjang secara konsisten.



# Investasi untuk Memenuhi Ibadah Kurban

Berkurban di hari raya Iduladha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Namun, mahalnya biaya hewan kurban sering menjadi alasan menunda melaksanakan ibadah ini. Untuk itu, kamu perlu siasat menabung dan investasi agar mampu menjalankan ibadah berkurban.

**B**erkurban adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Iduladha. Hukum kurban adalah *sunah muakad*, yaitu ibadah sunah yang sangat dianjurkan dan diutamakan, bahkan mendekati wajib bagi yang mampu. Banyak ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama, dibandingkan infak maupun sedekah yang senilai dengan hewan kurban tersebut, atau bahkan nilai yang lebih besar daripada harga hewan kurban.

Berkurban merupakan salah satu amalan yang paling disenangi Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa ridha Allah telah turun untuk



umatnya yang berkorban, bahkan sebelum tetesan darah hewan yang disembelih jatuh ke bumi. Selain itu, hadis lain menyebutkan bahwa umat muslim akan mendapatkan kebaikan sebanyak bulu hewan yang dijadikan kurban dan diampuni dosanya.

Hewan yang boleh dijadikan hewan kurban antara lain kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Harga hewan kurban di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari Rp3 juta sampai puluhan juta rupiah. Saat mendekati Iduladha harga hewan ternak cenderung naik, maka salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan membeli hewan kurban di peternakan jauh sebelum hari raya. Hewan tersebut akan diurus dan dibesarkan hingga tiba Iduladha.

Namun begitu, kendala biaya juga bisa diatasi dengan menyiapkan dana kurban sejak jauh-jauh hari dengan menabung. Namun, perlu diingat bahwa setiap tahun harga hewan kurban selalu meningkat, sementara tabungan tidak ada peningkatan nilai. Jika memilih untuk menabung, bisa menabung dengan melebihi target dana yang akan dikumpulkan sesuai dengan kemungkinan kenaikan harga hewan kurban di masa yang akan datang.



Selain itu, juga bisa mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban ini dengan cara berinvestasi. Cara ini memiliki potensi peningkatan nilai yang lebih baik daripada sekadar menabung. Salah satu instrumen investasi yang bisa dipilih adalah investasi reksa dana. Investasi ini bisa berpeluang mendapatkan imbal hasil dan bisa mengalahkan kenaikan harga hewan kurban di masa yang akan datang.

Salah satu produk reksa dana yang bisa dipilih adalah reksa dana pendapatan tetap yang memiliki peluang imbal hasil mencapai 6% dalam satu tahun terakhir. Jadi, jika mempersiapkan diri untuk membeli kambing kurban seharga Rp3 juta dalam waktu satu tahun, bisa mengumpulkan Rp250 per bulannya

dengan potensi imbal hasil hingga Rp180 ribu. Potensi imbal hasil ini bisa menutup kemungkinan adanya kenaikan harga kambing tersebut di masa yang akan datang.

Itulah cara berinvestasi untuk membeli hewan kurban yang bisa dijadikan referensi. Meski demikian, tentu bebas memilih cara mana yang sesuai dengan kebutuhan dalam mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban. Melihat keutamaannya, sudah selayaknya umat Islam berusaha untuk menunaikan ibadah kurban pada hari raya Iduladha. Berkorban tidak selalu harus menunggu berlimpah harta. Berapapun penghasilan atau gajimu, kamu bisa berkorban asalkan disiplin menabung dan menjadikannya prioritas.



# Pentingnya Menghitung Ekses Asuransi dalam Perencanaan Keuangan

Di era sekarang, kita tidak bisa melupakan asuransi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan finansial. Tapi, di dalam polis asuransi ada istilah “ekses” yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Kenali lebih dalam apa itu ekses asuransi dan pengaruhnya dalam perencanaan keuangan pribadi.

**E**kses atau yang juga dikenal dengan sebutan *deductible* merupakan jumlah uang yang harus dibayar sendiri sebelum perusahaan asuransi mulai memberikan penggantian. Contohnya, jika memiliki ekses asuransi sebesar Rp1 juta dan mengajukan klaim sebesar Rp5 juta, berarti harus membayar ekses Rp1 juta terlebih dahulu, baru nanti sisanya sebesar Rp4 juta akan ditanggung oleh asuransi.

Pertanyaannya, apakah hal tersebut merugikan kita? Dalam asuransi kesehatan, ekses asuransi yang menjadi biaya yang tidak bisa ditanggung perusahaan asuransi kesehatan memang menjadi bagian penting dari kebijakan asuransi itu





dari rumah sakit untuk melakukan koordinasi. Pastikan dokumen-dokumen tersebut diterima dari rumah sakit, agar proses klaimnya bisa lancar.

Salah satu prinsip asuransi adalah *utmost good faith* atau itikad baik. Dalam hal ini perusahaan asuransi akan menjalankan tanggung jawab memenuhi klaim konsumen sesuai dengan polis yang telah disepakati. Sementara itu, konsumen juga perlu beritikad baik dalam mengajukan klaim. Klaim harus dilakukan dengan jujur tanpa maksud mencari keuntungan pribadi. Kecurangan atau penipuan dalam klaim asuransi menyalahi prinsip itikad baik dan dapat ditolak oleh perusahaan.

Jadi, bagaimana mengantisipasi eksekusi klaim? Prinsip dasar asuransi kesehatan adalah manajemen risiko finansial, evaluasi setiap risikonya. Cek kondisi keuangan, kalau ada dana darurat yang cukup, eksekusi bisa ditingkatkan untuk menurunkan premi. Selalu lakukan perbandingan, pelajari dengan seksama setiap produk asuransi, seperti apa eksekusi, premi, dan manfaat yang ditawarkan. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan.

Namun bila terlanjur menghadapi eksekusi klaim karena adanya biaya perawatan di atas limit, maka siapkanlah dana darurat untuk membayar pengeluaran ini. Hidup itu dinamis, jadi kondisi keuangan dan kebutuhan pun bisa berubah. Maka kebijakan asuransi yang telah dipilih harus selalu diperbarui.

Ekses asuransi memang bagian penting dari kebijakan asuransi. Dengan memahami konsep eksekusi asuransi dan pengelolaan keuangan yang bijak, kita bisa mendapat perlindungan yang optimal tanpa memberatkan diri sendiri secara finansial.

sendiri. Hal ini terjadi karena biaya untuk setiap perawatan sudah melewati batas plafon. Pada intinya, meski polis asuransi menyebutkan bahwa semua biaya yang muncul akan ditanggung sesuai tagihan, tetap ada limit maksimal dari setiap biaya medis di asuransi kesehatan.

Ekses asuransi memiliki peran penting dalam mengontrol klaim, membantu untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan klaim, dan menurunkan premi asuransi. Pemilihan eksekusi yang sesuai dan manajemen keuangan yang bijak adalah kunci dalam kebijakan asuransi yang efektif. Sebab, eksekusi yang terlalu tinggi tentu saja akan membuat beban keuangan bertambah. Namun, eksekusi yang terlalu rendah tentu akan meningkatkan premi yang harus dibayar jadi lebih mahal.

Selain dari mahalnya biaya perawatan, ada penyebab lain yang bisa menimbulkan eksekusi klaim. Dan jangan salah, jika tidak mengantisipasi

ini, maka bisa saja mengalami kerugian finansial ke depannya. Seperti perawatan yang tidak tercantum dalam polis. Ada beberapa tindakan medis atau perawatan yang memang tidak ditanggung oleh asuransi atau dikenal sebagai pengecualian. Misalnya cuci darah, sunat yang tak berhubungan dengan penyakit, dan lainnya.

Kejadian gagal dalam memenuhi persyaratan klaim juga sering terjadi sehingga asuransi tidak mengkompensasi biaya perawatan. Misalnya saat melakukan pembayaran klaim usai selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Berarti bisa dipastikan, menalangi biaya pengobatan terlebih dulu atau bisa juga menggunakan fasilitas asuransi lain dan ingin melakukan klaim ganda (*double claim*) dengan dua asuransi. Proses klaim ganda setiap asuransi juga berbeda-beda. Dan umumnya, perusahaan asuransi yang menerima pembayaran klaim akan meminta beberapa formulir

# OJK Gelar Kampanye Nasional Keuangan Syariah Selama Bulan Ramadan



Selama bulan Ramadan 1445 H/2024, OJK menggelar rangkaian kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang merupakan kampanye nasional keuangan syariah. Dalam kegiatan ini, dibahas tentang produk syariah dari sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank.

**O**JK terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah dengan mengoptimalkan momentum Ramadan 2024 melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024. GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatannya keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.

Kampanye tersebut merupakan kolaborasi OJK bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) penggerak keuangan syariah, antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Pelaku Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), media massa, *influencer*, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi hadir dalam kegiatan pembukaan GERAK Syariah yang dilakukan secara virtual pada Rabu, 13 Maret 2024 dan dihadiri 3.000 orang peserta *online* dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Friderica menyampaikan bahwa OJK akan terus senantiasa berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kegiatan GERAK Syariah telah dibuka secara resmi dengan dua rangkaian kegiatan yaitu *Talkshow* Islami yang diisi oleh konten kreator keislaman, yaitu Habib Husein Ja'far. Dilanjutkan dengan *Webinar* Edukasi Keuangan Momentum Hari Hak Konsumen Sedunia yang diisi oleh Greget Kalla Buana selaku *influencer* keuangan syariah.

Kegiatan GERAK Syariah 2024 telah didahului dengan kegiatan Tarhib Ramadan dan Road To GERAK Syariah 2024 pada Jumat, 8 Maret 2024 yang diisi dengan kegiatan *webinar* edukasi keuangan syariah yang menampilkan Dai Nasional, yaitu Ustadz Hilman Fauzi dan *influencer* Prita Ghozie dihadiri oleh sekitar 2.200 peserta *online*.

Puncak GERAK Syariah diselenggarakan secara *hybrid* pada 4 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian GERAK Syariah yang dilakukan oleh OJK termasuk Kantor OJK di daerah serta *stakeholders* terkait.

GERAK Syariah 2024 akan berlangsung sampai 10 April 2024 dengan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA). KOLAK akan diisi oleh kegiatan *webinar*, *podcast*, *talkshow* radio, dan edukasi di media sosial.

Sementara itu, KURMA terdiri dari berbagai kompetisi/kuis yaitu Lomba Kultum Keuangan Syariah, Lomba Reels Edukasi Keuangan Syariah, Lomba Hadrah, Lomba *Call for Content*, dan Kuis Mingguan. Panitia GERAK Syariah 2024 menyiapkan hadiah dengan total Rp80 juta, *e-certificate*, dan berbagai hadiah

menarik lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan tentang GERAK Syariah 2024 akan di-*update* melalui kanal media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Sikapiuangmu.

Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 9% (tahun 2022) menjadi 39% di tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan puncak GERAK Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI, Adiwarmanto A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik "Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah". Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI, Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta *stakeholders*.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJKS syariah dan *stakeholders* terkait.

# Perlindungan Data Pribadi Terkait Sosialisasi KTP Digital

Seiring penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital yang telah diterapkan secara resmi 2023 lalu. Pemerintah juga telah memperkuat peraturan terkait perlindungan data pribadi konsumen di dunia maya.

**D**igitalisasi merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Proses transformasi dari sistem manual ke sistem digital di semua lini ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, mulai dari dunia usaha, pemerintahan, dan keperluan lainnya.

Digitalisasi di sektor kependudukan juga diberlakukan yakni dengan mentransformasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik menjadi KTP digital atau lebih dikenal dengan sebutan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sederhananya, tujuan digitalisasi KTP ini sebagai validasi identitas digital seseorang di dunia maya.

Serupa dengan keberadaan seseorang di dunia nyata, keberadaan seseorang di dunia maya juga memerlukan identitas yang jelas. Jika pada kehidupan riil yang digunakan adalah identitas seperti KTP, maka identitas digital juga pada dasarnya memiliki konsep serupa, yakni sebuah berkas atau data yang menunjukkan data diri secara lengkap dan legal.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan IKD ini sejak 2021 dan masih terus berlangsung

perbaikan, sosialisasi, dan penerapannya secara bertahap. Selanjutnya, bagi penduduk yang telah berhasil menggunakan IKD melalui aplikasi dalam gawainya, dapat langsung memanfaatkan IKD tersebut. Diantaranya untuk verifikasi, autentikasi, maupun untuk otorisasi. Umumnya, lembaga keuangan adalah pihak yang kerap meminta seseorang untuk melakukan verifikasi data pribadi terkait transaksi keuangan digital.

Lalu, bagaimana dengan perlindungan data pribadi seseorang yang sudah masuk ke dunia maya? Hingga saat ini perlindungan konsumen dalam ekonomi digital melibatkan berbagai isu. Perlindungan data pribadi



merupakan salah satu masalah di Indonesia yang harus segera diselesaikan karena jumlah kasus terkait data pribadi terus meningkat, sementara peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ini masih tersebar di berbagai sektor dan berada di bawah berbagai otoritas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan upaya yang kurang fokus dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi konsumen.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan peraturan perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Lalu diperkuat lagi dengan mengacu pada European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang telah resmi diberlakukan 2024 ini.

Untuk lebih spesifiknya lagi, yakni perlindungan data pribadi di sektor ekonomi digital, OJK sebagai lembaga yang berwenang juga sudah menerbitkan sejumlah peraturannya melalui POJK yakni POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Pemerintah yang berkomitmen melindungi data penduduknya maupun OJK yang bertanggung jawab melindungi data konsumen di sektor ekonomi bahu membahu mewujudkan ekosistem digital yang aman. Namun, konsumen dalam menggunakan IKD atau data pribadi lainnya di dunia maya tetap perlu berhati-hati, terutama jika diminta menyerahkan data pribadi ke pihak tidak dikenal seperti transaksi ekstrateritorial atau lintas batas. Sebab kurangnya kendali atas penyebaran data yang kita berikan tersebut masih menjadi isu besar dan perlu penanganan yang lebih serius.

# Resiliensi Jasa Keuangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

**Hingga kuartal kedua 2024, pertumbuhan ekonomi nasional masih positif yang didukung oleh resiliensi dari berbagai sektor jasa keuangan. OJK optimis kondisi perekonomian dalam negeri tetap stabil seiring pasar keuangan global yang juga terjaga kondusif.**

**D**i tengah perkembangan geopolitik global yang masih rentan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih tetap terjaga stabil. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung pada 27 Maret 2024, menilai kinerja intermediasi masih kontributif, didukung oleh

likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. OJK menilai kondisi perekonomian dan pasar keuangan global secara umum lebih baik dari ekspektasi.

Di Amerika Serikat, kinerja ekonomi AS tercatat solid dan di atas ekspektasi, sehingga inflasi masih terjaga. The Fed pada FOMC Meeting Maret

2024, merevisi pertumbuhan ekonomi AS cukup signifikan diiringi kenaikan perkiraan inflasi. Meski demikian, The Fed tetap mempertahankan rencana penurunan *Fractional Flow Reserve (FFR)*/ Cadangan aliran fraksional sebesar 75 basis poin (bps) di tahun 2024.

Likuiditas di pasar diperkirakan juga akan lebih baik seiring rencana the Fed mengurangi laju *quantitative tightening*. Kebijakan akomodatif the Fed juga diikuti oleh European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BOE) yang mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga di 2024 dengan pasar memperkirakan ECB akan menurunkan suku bunga 125 bps dan BOE sebesar 75 bps.

Langkah normalisasi juga dilakukan oleh Bank of Japan (BOJ) yang meninggalkan era suku bunga negatif, dengan menaikkan suku bunga sebesar 10 bps, pertama dalam



8 tahun terakhir. Di Tiongkok, rilis beberapa kinerja ekonomi seperti penjualan ritel, kenaikan impor, dan tingkat inflasi di atas ekspektasi pasar dengan kebijakan fiskal dan moneter tetap akomodatif.

Dari sisi domestik, inflasi mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga pangan. Namun inflasi inti terjaga stabil, menghentikan tren penurunan sejak akhir 2022. Hal ini diharapkan menjadi indikasi pemulihan permintaan ke depan. Indikasi awal pemulihan konsumsi domestik juga terlihat dari peningkatan impor barang konsumsi yang cukup signifikan pada Februari 2024.

Kinerja sektor manufaktur juga tercatat terus membaik. Namun demikian, perlu terus dicermati tren penurunan surplus neraca perdagangan seiring dengan penurunan ekspor yang berkelanjutan serta peningkatan kebutuhan impor.

Sementara itu, perkembangan pasar modal dalam negeri menunjukkan tren penguatan, dengan nilai IHSG dan kapitalisasi pasar meningkat. Nilai transaksi pasar saham dan pasar obligasi juga tercatat stabil. Di sektor perbankan, menunjukkan kinerja yang tetap resilien dan stabil, didukung oleh tingkat profitabilitas, permodalan yang tinggi, dan kredit yang terus tumbuh. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan positif, sementara likuiditas industri perbankan dinilai memadai. Perlu perhatian terhadap risiko perbankan terutama risiko pasar dan kredit.

Untuk itu perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara memadai, serta secara rutin melakukan *stress test* untuk mengukur kemampuan permodalannya dalam

menyerap potensi risiko.

Sementara itu, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen, juga aktif dilakukan OJK. Salah satunya dengan berpartisipasi di forum internasional pada *joint meeting* G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection and Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) di Paris tanggal 19 – 20 Maret 2024 serta International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Committee 8 (C8) *meeting* di Madrid tanggal 21 – 22 Maret 2024. Pada pertemuan tersebut dibahas berbagai kebijakan serta perkembangan terkait konsumen dari berbagai negara antara lain terkait kesejahteraan finansial, kerentanan konsumen, keuangan berkelanjutan, kredit konsumen, *Buy Now Pay Later*, aset kripto, *financial influencer*, *fraud* dan *scam*.



# Perkuat Implementasi ESG untuk Menuju Indonesia Emas 2045

**K**etua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Armand Wahyudi Hartono, terus mendorong perusahaan untuk dapat melanjutkan program praktik keberlanjutan *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang bertanggung jawab. Menurut Armand, implementasi ESG merupakan upaya untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia emas 2045. Upaya tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi berbagai pihak, baik itu masyarakat, akademisi, industri, hingga pemerintah. Kolaborasi yang baik pada prinsipnya akan memberikan hasil yang baik pula, salah satunya generasi cerdas dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Armand menilai, pentingnya implementasi ESG akan banyak memberikan keuntungan bagi pihak yang menerapkannya. Apa saja keuntungan tersebut dan bagaimana Armand menilai praktik ESG di Indonesia menurut kacamata sebagai Ketua AEI?

## Seberapa penting penerapan ESG dalam perusahaan?

Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perusahaan sangat penting karena berbagai alasan. Pertama, ESG membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan dengan lebih baik, memastikan operasi yang bertanggung jawab dan pengurangan emisi karbon. Kedua, aspek sosial dari ESG memastikan perhatian pada kesejahteraan karyawan, komunitas, dan pelanggan melalui praktik ketenagakerjaan yang adil, keselamatan kerja, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Ketiga, tata kelola yang baik dalam ESG memastikan struktur manajemen yang transparan dan bertanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang etis dan berkelanjutan, membantu menghindari skandal dan praktik bisnis yang tidak etis. Selain itu, perusahaan yang menerapkan ESG sering kali lebih disukai oleh investor, pelanggan, dan mitra bisnis karena dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terakhir, ESG membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang mereka, memungkinkan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan perubahan regulasi di masa depan. Secara keseluruhan, penerapan ESG



**Armand Wahyudi Hartono**  
Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia

dapat meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan. Terutama untuk perusahaan publik, faktor *governance*

sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan *stakeholders*.

**Bagaimana penerapan ESG di Indonesia?**

Penerapan ESG di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat banyak perusahaan yang semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul



dari operasional mereka. Demikian pula investor melihat faktor ESG sebagai arus utama pengambilan keputusan investasi. Di pasar keuangan, telah banyak instrumen keuangan hijau dan sosial yang diterbitkan oleh perusahaan dan laris diserap oleh pasar. Khusus di sektor perbankan, OJK telah menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk bank mengidentifikasi kriteria hijau debitur badan usaha. Bahkan kini telah hadir perdagangan karbon kredit di Indonesia. Semua ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan dan kesadaran ESG di Indonesia.

Melihat perkembangan ESG di luar negeri, Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama multipihak dan bilateral. Di dalam negeri, kesenjangan pemahaman ESG juga masih tampak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku bisnis dan industri untuk memacu semangat perubahan. Selain itu, kebutuhan pengembangan riset dan *database* yang komprehensif tidak boleh terabaikan terutama terkait kajian iklim. Dan tentunya kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penerapan ESG di Indonesia.

**Apa dampak penerapan ESG terhadap nilai perusahaan?**

Kinerja ESG turut berkontribusi meningkatkan nilai perusahaan dari sudut pandang pemangku kepentingan. Banyak manfaat dari menerapkan prinsip ESG dalam praktik

bisnis, antara lain memberikan keunggulan kompetitif; mengidentifikasi risiko baru; mendorong praktik operasional yang ramah lingkungan; meningkatkan reputasi perusahaan; lebih siap menghadapi ketidakpastian dan menurunkan risiko; menarik minat investor jangka panjang; peningkatan kepercayaan pasar dan *business partner*; nasabah dan masyarakat akan lebih loyal pada perusahaan; mendongkrak nilai saham perusahaan; dan lain-lain.

**Bagaimana AEI mendorong penerapan praktik ESG? Apa yang dilakukan AEI untuk para emiten?**

AEI akan terus mendorong emiten untuk menerapkan praktik ESG. Kita sudah menyadari manfaat dan dampak positif dari bisnis yang menjalankan ESG akan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. ESG merupakan perjalanan yang panjang, *it's a journey*, kami terus mengingatkan anggota untuk inisiatif berkolaborasi dan bersinergi multipihak agar membuka pintu mencari peluang, kesempatan, dan belajar bersama selama perjalanan ini. Fokus utama AEI adalah pada faktor *governance* untuk memastikan perusahaan dipercaya oleh *stakeholders*.

AEI juga memfasilitasi dialog dan kerja sama dengan pemerintah, regulator, lembaga swasta, akademisi dan lainnya untuk mengembangkan kemitraan. Melalui AEI Academy, kami juga melakukan edukasi dan *awareness* topik-topik ESG antara lain tentang emisi karbon/ perdagangan karbon, pelaporan ESG, praktik-praktik GCG serta etika bisnis.

**Apa harapan AEI dengan penerapan praktik ESG di perusahaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045?**

Praktik ESG menjadi semakin penting bagi dunia usaha, karena para pemangku kepentingan menuntut akuntabilitas yang lebih besar atas praktik-praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Walaupun banyak perusahaan menghadapi hambatan ketika mencoba mengintegrasikan ESG ke dalam strategi perusahaan mereka, pertimbangan ESG dalam strategi perusahaan tidak dapat diabaikan. Perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan dan berkomitmen akan memperoleh manfaat besar dari peningkatan kinerja keuangan, dampak investasi, reputasi dan nilai *brand* yang menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dimulai dari kinerja perusahaan yang sehat dan *governance* yang dipercaya.

Kita menyadari bisnis berkelanjutan penting untuk menyambungkan masa kini dengan masa depan. Kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia Indonesia Emas 2045.



## OJK Dukung Upaya Pemberantasan Aktivitas Judi *Online*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemberantasan judi *online* di Indonesia termasuk dengan memerintahkan bank untuk memblokir rekening yang terindikasi judi *online*.

**K**epala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi *online*.

Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk

memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi *online*; meminta bank melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi *online* dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan



praktik jual beli rekening, menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi *online* yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Perbankan juga melakukan *web crawling* dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup *website* judi *online*, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

OJK beserta 35 Kantor OJK yang tersebar di berbagai provinsi telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang bekerja sama dengan perbankan dan pihak terkait. OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi *online* perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi *online* bagi masyarakat. Selanjutnya OJK juga telah melakukan koordinasi dengan para pimpinan perbankan untuk menekankan komitmen manajemen dalam melakukan pemberantasan judi *online* baik secara internal dan eksternal.

Penanganan judi *online* harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024. OJK sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi *online* dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

kepada PPAK. Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi *online*, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (*blacklisting*).

OJK bersama perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan

dalam pemberantasan judi *online* melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktik jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi *online*.

Selanjutnya, perbankan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi *online*, antara lain dengan menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi



## Strategi Bisnis Kuliner Vegetarian

Industri vegan dan vegetarian telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa sejak 2014. Kuliner sehat satu ini mulai diminati dan menjadi bagian dari gaya hidup. Apakah tertarik mengambil peluang besar berbisnis di industri ini?

**K**uliner vegetarian kini mulai menjadi tren di tengah masyarakat, mengingat banyak orang yang menyadari untuk hidup sehat, hingga mengubah gaya hidupnya dengan mengonsumsi aneka makanan vegetarian. Mengonsumsi menu vegetarian memang tidak akan langsung terlihat hasilnya dalam waktu dekat. Namun, efeknya tetap bisa dirasakan dalam beberapa waktu kedepan ketika sudah rutin mengonsumsi menu vegetarian.

Biasanya konsep hidup vegetarian akan dipilih oleh mereka yang memang disarankan untuk menghentikan konsumsi makanan hewani dengan tujuan menghindari penyakit-penyakit tertentu. Meski sudah mulai banyak orang yang menyukai gaya hidup vegetarian, bukan berarti bisnis kuliner ini langsung mencetak kesuksesan di awal-awal operasionalnya. Pangsa pasarnya sangat spesifik sehingga dibutuhkan strategi yang jitu untuk bisa berhasil menggarap bisnis ini.

Namun, pada dasarnya terjun di bidang bisnis kuliner pasti akan mendatangkan keuntungan mengingat manusia membutuhkan makan. Hanya

saja diperlukan perhitungan yang matang. Bagi yang tertarik untuk menjajal peluang bisnis ini, dapat mempertimbangkan tips berikut.

**1. Jadilah vegetarian**

Jika ingin membuka bisnis vegetarian, sebaiknya dimulai dari diri sendiri dulu yaitu dengan ikut mengonsumsinya juga. Dengan begitu akan lebih memahami mana makanan yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Hal ini menyangkut pada bisnis yang nantinya lebih menjawai, biasanya bisnis akan berjalan lancar kalau pemiliknnya ikut menyukai produk yang dijualnya.

**2. Pahami dan selami lebih dalam**

Terkadang masih banyak pelaku bisnis yang asal mengikuti tren saja tanpa tahu seluk beluk dari kuliner vegetarian. Mereka cenderung mengikuti apa yang dijual oleh pebisnis lain, tanpa tahu apa yang dimaksud baik atau tidak untuk dijual. Pasalnya, tidak semua jenis menu vegetarian

bisa menyeimbangkan tubuh, harus ada beberapa jenis yang dapat memenuhi zat gizi, seperti makanan nabati yang terkandung dalam nutrisi daging. Untuk memperdalam ilmu gizi tentang menu vegetarian, bisa menanyakan pada ahlinya atau membaca artikel yang akurat.

**3. Pilihlah staf/karyawan yang berkompeten**

Tidak disarankan untuk memakai koki yang hanya sekedar bisa masak. Akan lebih baik kalau merekrut karyawan yang sudah berpengalaman dalam mengelola kuliner vegetarian.

Mereka yang berpengalaman akan lebih mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya mengolah sayur/buah di tempat bekas mengolah daging yang belum dicuci, sebisa mungkin semua tempat terhindar dari jenis makanan yang bukan vegetarian. Intinya orang yang berpengalaman dapat mengurangi resiko kesalahan

dalam penyajian makanan, lebih baik lagi kalau mereka juga seorang vegan.

**4. Buatlah varian menu yang beragam**

Makanan vegetarian tidak selalu hanya tentang sayuran hijau. Masih banyak pilihan bahan makanan vegetarian yang bisa dijual dalam menu. Berekreasilah agar konsumen tidak bosan. Bahkan disarankan bisa meniru bentuk-bentuk makanan non vegan yang bisa merangsang selera makan. Perlu diingat meski bisnis ini menggiurkan, persaingannya pun juga ketat. Maka persiapkan diri untuk menciptakan menu vegetarian yang benar-benar memanjakan lidah konsumen.

**5. Lakukan pemasaran yang efektif dan efisien**

Agar dapat meningkatkan penjualan, dibutuhkan pemasaran yang tepat, perlu menyusun strategi marketing agar bisa menjangkau target pasar yang lebih luas. Misalnya tidak hanya melayani konsumen *dine in*, namun juga *take away* lewat aplikasi. Manfaatkan media sosial, yang tidak hanya digunakan sebagai promosi namun juga media edukasi tentang gaya hidup vegetarian. Semakin orang memahami tentu akan berdampak baik bagi bisnis.

Dengan mengetahui strategi bisnis restoran vegetarian, bisa dimulai dengan membuat rencana dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan konsep bisnisnya. Pastikan rencana sudah tersusun matang agar bisa mengetahui besaran modal yang dibutuhkan.



# Memanfaatkan Produk Investasi untuk Dana Pendidikan

Sudahkah menyiapkan dana pendidikan untuk buah hati? Lakukanlah sekarang sebelum terlambat. Pilihlah jenis investasi sesuai kebutuhan, dan kenali lebih dalam manfaat dan risikonya.



Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya, termasuk memberikan pendidikan. Sekolah yang bermutu tentu tidaklah murah sehingga perlu persiapan untuk mengumpulkan biayanya.

Dana pendidikan akhirnya menjadi salah satu tujuan keuangan yang utama. Mengingat nominalnya yang cukup besar dan mempertimbangkan tingkat inflasi biaya pendidikan yang cukup tinggi, serta semakin ketatnya proses seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi, maka sebaiknya para orang tua menyiapkan dana pendidikan anak sejak dini.

Lalu jenis investasi apa yang cocok untuk mempersiapkan dana pendidikan anak? Inilah yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang tua. Bingung harus memilih jenis investasi

yang mana sangatlah wajar, namun tetap harus mempelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis investasi dan mengenali risikonya agar upaya dalam mengumpulkan dana pendidikan tidak sia-sia.

Pertimbangkan pula kebutuhan dan target waktunya, agar dana yang diinvestasikan pada produk investasi yang sudah dipilih tepat sasaran dan tepat guna. Misalnya memilih jenis tabungan khusus pendidikan. Jenis investasi ini tidak terlalu berisiko, tinggal menyetor uang yang sudah dianggarkan ke lembaga keuangan yang dipilih. Sayangnya, suku bunga tabungan pendidikan sangat rendah yaitu 2% - 4%. Kurang sesuai untuk investasi jangka pendek. Namun, jika kebutuhan dana pendidikan masih sangat lama, masih bisa memilih jenis investasi ini sebab semakin panjang waktunya maka semakin besar jumlah bunga yang didapatkan.

Pilihan lainnya, bisa memakai asuransi pendidikan. Agak mirip dengan tabungan pendidikan, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sesuai namanya, asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang memberikan proteksi atas pendidikan anak. Asuransi pendidikan sendiri merupakan gabungan dari produk asuransi jiwa berjangka dan tabungan. Besarnya dana pendidikan yang didapatkan akan disesuaikan dengan akad atau perjanjian yang tertulis dalam polis asuransi. Jadi, baca dan pahami dengan baik setiap poin yang tercantum dalam polis asuransi yang dipilih.

Jika ternyata hanya memiliki waktu sekitar 1-3 tahun untuk menyiapkan dana pendidikan anak, bisa membentuk suatu portofolio investasi yang sebagian besar isinya adalah instrumen reksa dana pasar uang dengan sedikit porsi di reksa dana saham. Reksa dana pasar uang

memiliki potensi imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan tabungan atau deposito dengan tingkat risiko yang relatif rendah, likuid dan bebas biaya transaksi.

Bagi yang memiliki waktu persiapan antara 3 - 5 tahun, atau dalam jangka waktu menengah, bisa memanfaatkan reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana pasar uang, atau manfaatkan reksa dana campuran jika tidak mau repot. Komposisi terbesar portofolio investasi sebaiknya diisi oleh reksa dana pendapatan tetap, dengan pertimbangan potensi imbal hasilnya yang lebih menarik dibandingkan reksa dana pasar uang.

Sementara itu, jika waktu yang dibutuhkan ternyata masih sangat panjang yakni 5 tahun keatas, bisa menyusun portofolio dengan porsi reksa dana saham yang lebih banyak. Dengan potensi imbal hasil yang relatif tinggi, reksa dana saham juga memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi.

Perlu diingat dalam investasi berlaku prinsip *high risk high return* – *low risk low return*. Oleh karena itu, juga disarankan untuk tetap melakukan diversifikasi ke reksa dana yang memiliki risiko lebih rendah, seperti reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar uang. Jadi, pos dana pendidikan jangka panjang ini sangat cocok untuk persiapan masuk ke universitas bila anak saat ini masih di bangku SD.

Pilihan lain, bisa berinvestasi lewat emas atau properti. Harga emas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Semakin cepat memulai investasi emas, potensi untungnya tentu semakin besar. Untuk investasi properti, hampir mirip dengan emas. Semakin lama harganya cenderung naik. Jadi, baik emas maupun properti lebih cocok untuk investasi jangka panjang.



# Tabungan Haji dan Modal Ventura

**K**ontak 157 adalah media komunikasi dari OJK untuk menerima suara konsumen. Ada tiga layanan utama, yaitu layanan pertanyaan, layanan laporan, dan layanan pengaduan. Ketiga layanan tersebut terus mengalir ke Kontak 157. Periode Januari – April 2024, OJK menerima 127.220 layanan konsumen. Layanan tersebut terdiri dari 14.068 informasi, 104.051 pertanyaan, dan 9.101 pengaduan.

Tiga produk teratas yang banyak ditanyakan adalah pertanyaan *fintech*-pinjaman *online* multiguna (penerima dana) sebanyak 23.216 pertanyaan, mengenai pembiayaan multiguna-pembayaran angsuran sebanyak 7.550 pertanyaan, dan mengenai transfer dana/ RTGS sebanyak 5.115. Tiga produk teratas yang banyak mendapat pengaduan adalah *fintech*-pinjaman *online* multiguna (penerima dana) sebanyak 2.639, pembiayaan multiguna-pembayaran angsuran sebanyak 954, dan pengaduan produk pembiayaan lainnya sebanyak 898.

OJK juga mencatat informasi pertanyaan mengenai tabungan haji dan modal ventura. Terdapat beberapa pertanyaan dari konsumen mengenai tabungan haji dengan substansi pertanyaan diantaranya sebagai berikut:

pertanyaan mengenai perbedaan informasi saldo tabungan Haji pada buku rekening dengan rekap dari bank; dan pertanyaan mengenai mekanisme pemotongan tabungan haji untuk premi asuransi.

Terkait modal ventura, konsumen menanyakan legalitas produk dan lembaga jasa keuangan modal ventura, informasi terkait prosedur permintaan sistem layanan informasi keuangan perorangan untuk keperluan pengajuan kredit/ pinjaman atas fasilitas di perusahaan modal ventura; mekanisme permohonan penghapusan bunga dan pengurangan hutang pokok pinjaman kepada perusahaan modal ventura; dan ketentuan yang mengatur perilaku petugas penagihan perusahaan modal ventura.

Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif maupun kuratif melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

## Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Tahun 2023 Periode 1 Januari - 30 April 2024



# Kenali Beda *Paylater* dan *Fintech Lending*

***Paylater* dan *fintech lending* memang terlihat serupa. Namun, nyatanya kedua produk ini berbeda. Agar dapat memanfaatkan produk-produk keuangan tersebut dengan tepat guna, kenali perbedaannya serta plus-minus dari kedua produk keuangan tersebut.**

**L**ayanan *buy now, pay later* (BNPL) atau *paylater* serta *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* tumbuh subur di Indonesia. Banyak masyarakat yang memilih menggunakan layanan tersebut untuk kebutuhan bisnis hingga konsumtif, karena syaratnya yang mudah dan cepat.

PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) bahkan mencatat *outstanding amount paylater* mencapai Rp25,16 triliun pada semester I/2023. Angkanya melonjak 29,8% secara tahunan (*year-on-year*/

YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *outstanding* pembiayaan P2P *lending* per Oktober 2023 tumbuh 17,66% YoY menjadi Rp58,05 triliun.

Namun, masyarakat masih bingung dengan perbedaan antara layanan *paylater* dengan layanan seperti *fintech lending*. Sekilas, kedua layanan keuangan ini tampak seragam. Padahal ada perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari *paylater* dan *fintech lending*.

*Paylater* adalah layanan untuk menunda pembayaran dengan cara menyediakan fasilitas cicilan atau pelunasan terhadap tagihan transaksi. Layanan tersebut biasanya bisa ditemukan pada *platform e-commerce*, dompet digital, dan aplikasi pemesanan digital lainnya. Nasabah hanya perlu melakukan verifikasi

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengaksesnya.

Tenor *paylater* biasanya mencapai 1-12 bulan, apabila makin lama biasanya bunganya juga semakin tinggi. *Paylater* juga memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan seperti halnya tanggal jatuh tempo, hingga limit yang disediakan berbeda setiap nasabah tergantung kelayakan serta risiko kreditnya.

Produk *paylater* dapat memiliki lisensi dari perusahaan pembiayaan (*multifinance*) dan *fintech p2p lending*. *Paylater* itu sebagai metode pembayaran, sedangkan *fintech P2Plending* memberikan fasilitas secara *cash loan* (pinjaman tunai). *Fintech p2p lending* juga biasanya memiliki tenor yang relatif pendek dengan penawaran bunga yang lebih tinggi.

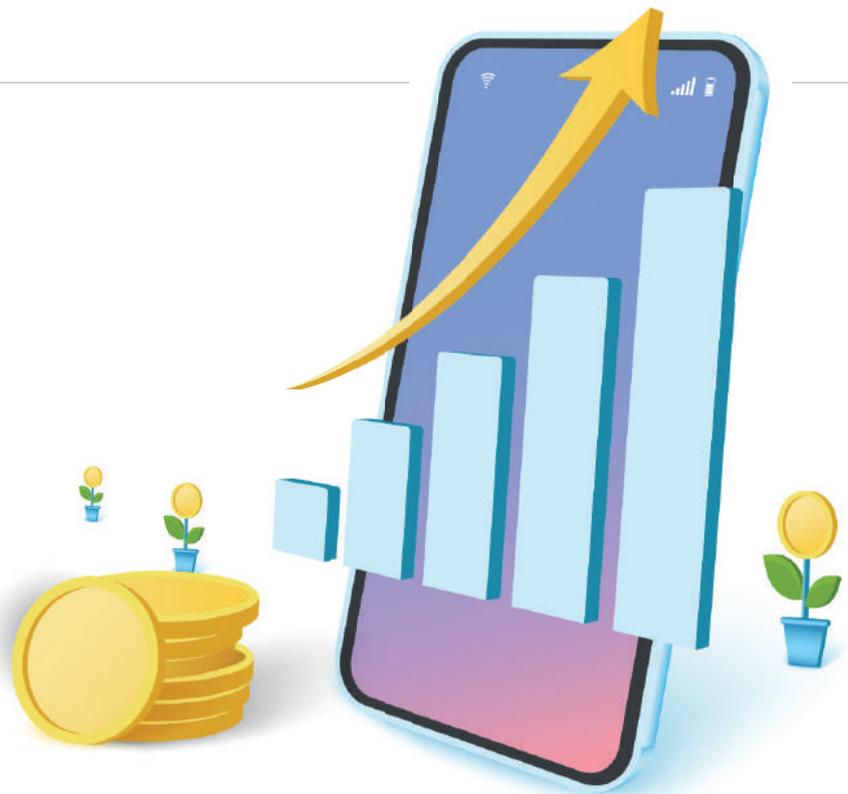
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022



tentang *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* adalah layanan pinjam meminjam uang antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Layanan ini biasanya digunakan untuk pinjaman tunai yang sifatnya produktif, yakni untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun ada juga yang menyediakan untuk pinjaman konsumtif.

Seperti halnya *paylater*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *fintech p2p lending*, di antaranya kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjaman, suku bunga, hingga tingkat keamanan.

Untuk mengakses *fintech p2p lending*, pengguna (*lender* dan *borrower*) bisa melakukan registrasi secara *online* pada *platform*. *Platform fintech lending* nantinya akan menganalisa dan memilih *borrower* layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko *borrower* tersebut. *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh *platform fintech p2p lending* dalam *marketplace fintech*



*lending* secara *online* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko *borrower* tersebut. Selain itu, investor *fintech p2p lending* juga bisa melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace fintech p2p lending* yang disediakan oleh *platform*.

Investor *fintech p2p lending* melakukan pendanaan ke *borrower*

yang dipilih melalui *platform fintech p2p lending*. *Borrower* nantinya mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *platform fintech p2p lending*. Investor *fintech lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* melalui *platform*. Saat ini, jumlah *fintech p2p lending* yang terdaftar di OJK berjumlah 103 perusahaan.

## Cek legalitas perusahaan keuangan melalui OJK

Dengan maraknya pinjol dan perusahaan keuangan di Indonesia, penting mengetahui perusahaan keuangan yang memiliki legalitas yang jelas.

Cara paling gampang adalah dengan mengecek legalitas perusahaan di *website* resmi OJK dengan cara berikut ini:

1. Buka laman pencarian dalam perangkat.

2. Buka *web* resmi OJK atau masukkan langsung link <https://ojk.go.id>

3. Nantinya akan langsung tersedia *template* data per bulan dan bisa cek satu per satu.

4. Klik opsi *find in page* atau temukan dalam laman dengan klik titik 3 vertikal di pojok kanan atas.

5. Ketik langsung perusahaan yang ingin dicari.

6. Nantinya status perusahaan akan terlihat bila memang perusahaan tersebut legal.

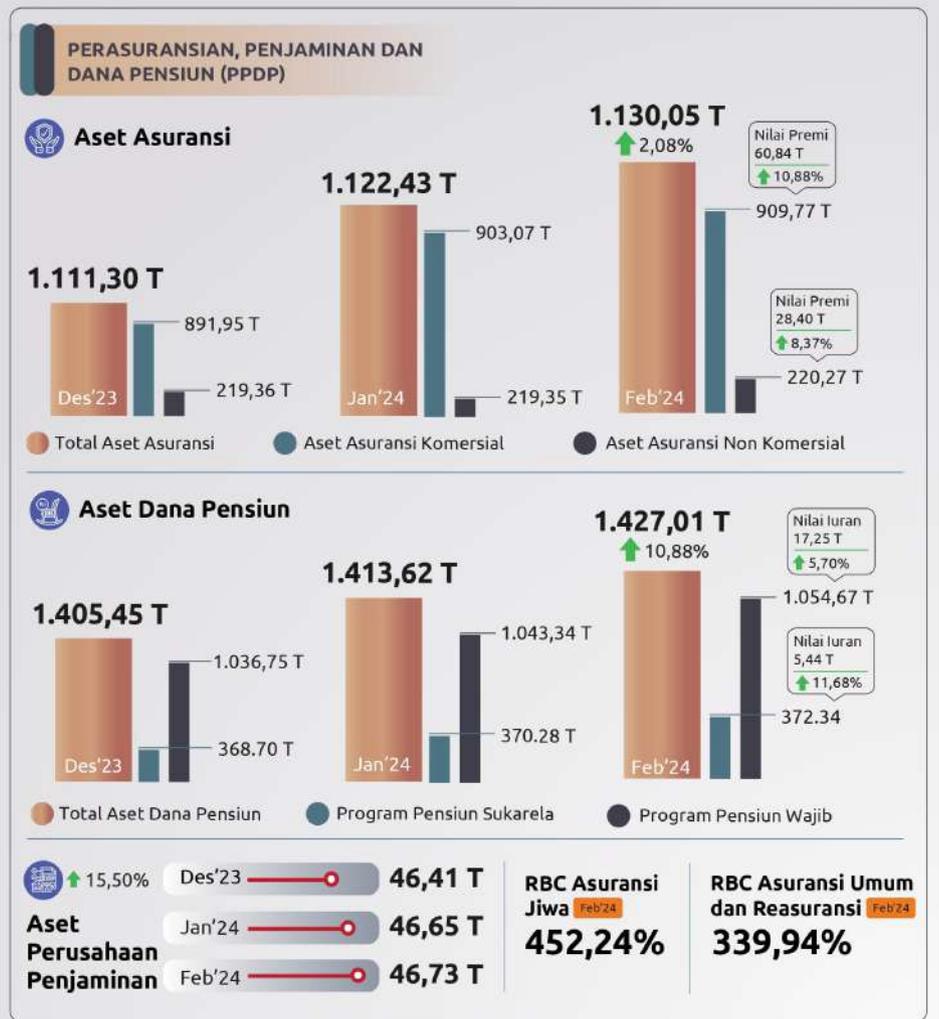
# Perkembangan Kinerja Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kuartal 1-2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi naik 2,49% secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp1.128,86 triliun di Maret 2024. Dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp1.101,47 triliun. Dari sisi kinerja asuransi komersial juga mengalami peningkatan total aset 3,04% YoY menjadi Rp909,4 triliun. Adapun total pendapatan premi mencapai Rp87,77 triliun atau naik 11,80% YoY di Maret 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan akumulasi pendapatan premi tersebut didukung oleh premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,09% YoY menjadi Rp45,78 triliun di Maret 2024. Sementara, kinerja asuransi umum dan reasuransi tumbuh 24,75% YoY menjadi Rp41,99 triliun.

Lalu dari sisi dana pensiun, total aset per Maret 2024 mengalami pertumbuhan 10,51% YoY menjadi Rp1.436,96 triliun dari tahun sebelumnya tercatat Rp1.299,96 triliun. Adapun, dari sisi perusahaan penjaminan total nilai aset mengalami kenaikan 12,74% YoY dengan nilai yang mencapai Rp47,37 triliun pada periode Maret 2024.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun, OJK terus melakukan



berbagai upaya mendorong kinerja lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki

kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis. OJK juga melakukan pengawasan khusus terhadap beberapa lembaga pengelolaan dana pensiun.

# Top 10 *Side Hustle* Menjanjikan

Menghadapi tingginya biaya hidup dan tantangan ekonomi, memiliki satu sumber pendapatan saja seringkali tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya banyak orang mencari peluang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka dengan mencari pekerjaan sampingan atau *side hustle*.



**S**ide hustle atau pekerjaan sampingan adalah cara yang tepat untuk menambah penghasilanmu tanpa perlu meninggalkan pekerjaan utama. Pekerjaan ini dilakukan di luar jam kantor utama atau di akhir pekan. Jika kamu ingin memulai *side hustle*, ada beberapa ide menarik yang dapat dicoba. Ide-ide ini mencakup berbagai bidang, dari kreativitas hingga keahlian khusus, dan dapat dijalankan dengan mudah di waktu luang.

Berikut ini adalah 10 *side hustle* mudah & menjanjikan yang dapat dilakukan.

1. Menulis  
Menulis adalah *side hustle* yang cocok untuk kamu yang memiliki bakat dalam mengungkapkan ide dan cerita lewat kata-kata. Kamu bisa mulai dengan membuat blog pribadi, menulis artikel pada situs-situs *web*, atau bahkan mencoba menjadi kontributor tetap untuk media *online*.
2. *Dropshipper* atau *Reseller*  
Jika kamu ingin memiliki usaha bisnis tanpa perlu menyimpan stok barang, menjadi *dropshipper* atau *reseller* bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu coba. Kamu hanya perlu menjual produk orang lain dengan *markup* harga dan menjual produk dari *supplier*. Selanjutnya, *supplier* sendiri yang akan mengirimkan produk tersebut langsung ke pelanggan atas nama kamu.
3. *Freelancer*  
Jika kamu memiliki keterampilan khusus seperti *web developer*, pemrograman, analisis data, *UX writer* dan *skill* lainnya.

*Freelancer* adalah cara yang tepat untuk menghasilkan uang dari *skill* yang kamu punya.

4. *Affiliator*  
Program afiliasi adalah cara untuk mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain. Jika kamu memiliki keahlian dalam pemasaran atau memiliki banyak pengikut di media sosial, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi *affiliator*.
5. *Content Creator*  
Seiring dengan perkembangan media sosial dan *platform* berbagi video, menjadi *content creator* dapat menjadi *side hustle* yang menarik. Jika kamu adalah orang yang kreatif dan memiliki kemampuan untuk membuat konten yang menarik, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, donasi, atau *sponsorship* dengan menjalani *side hustle* satu ini.
6. *Online Shop*  
Memiliki toko *online* adalah cara yang paling populer saat ini untuk menjual produk kamu sendiri, baik itu barang fisik atau digital. Kamu bisa menjual produk fisik seperti pakaian, aksesoris, atau produk digital seperti *e-book* atau *template* desain.
7. Guru Les *Online* atau *Offline*  
Jika kamu memiliki keahlian di bidang tertentu seperti matematika, bahasa asing, atau musik, menjadi guru les *online* atau *offline* bisa menjadi *side hustle* yang menjanjikan.

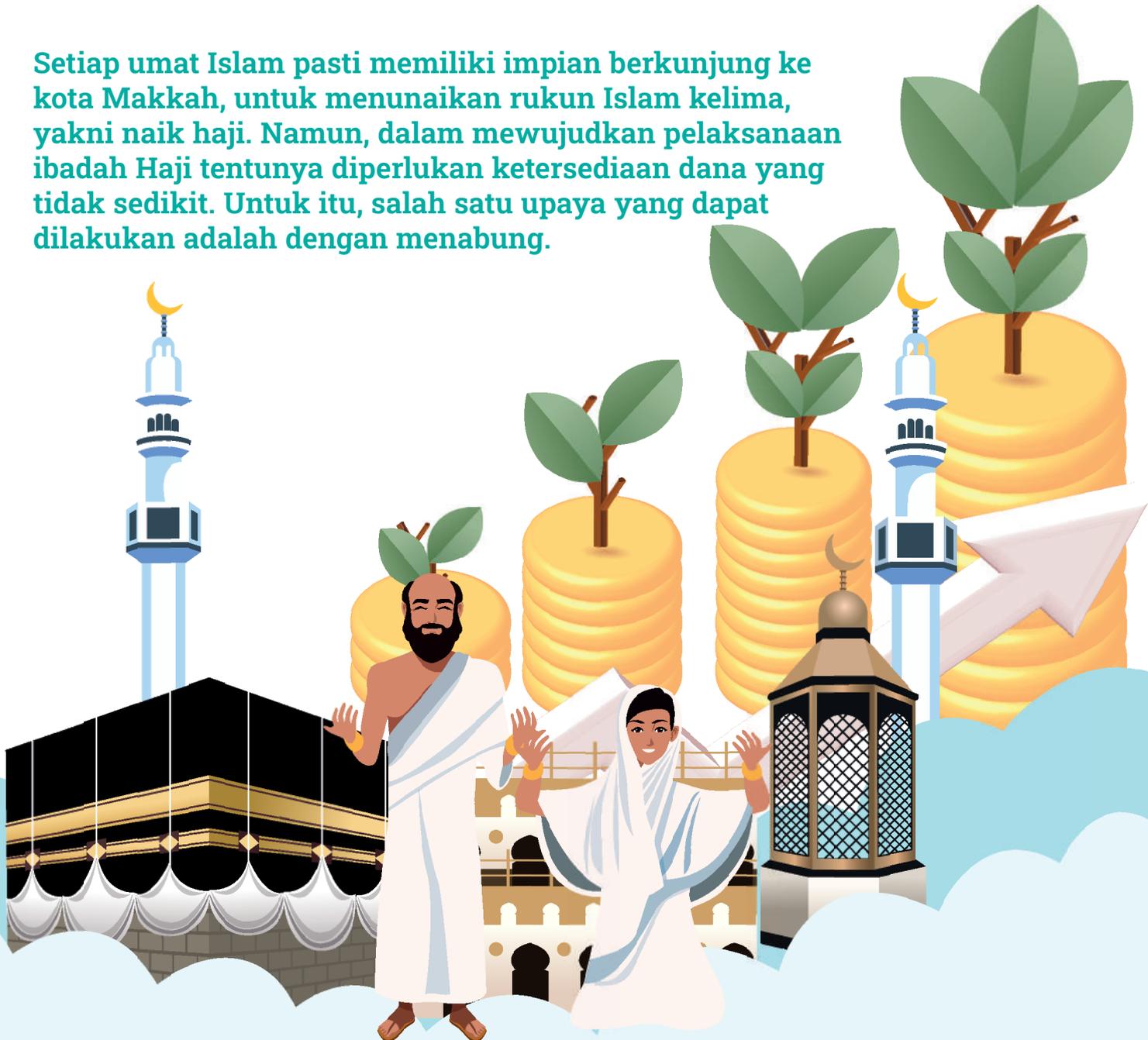
8. Asisten Virtual  
Sebagai asisten virtual, kamu akan membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas administratif atau organisasi dari jarak jauh. Kamu bisa menawarkan layanan seperti penjadwalan, manajemen email, atau entri data.
9. *Translator*  
Jika kamu menguasai lebih dari satu bahasa, menjadi *translator* adalah *side hustle* yang menarik dan bermanfaat. Kamu bisa membantu menerjemahkan dokumen, konten, atau percakapan dari satu bahasa ke bahasa lainnya.
10. *Digital Creative*  
Bagi kamu yang memiliki bakat dalam seni digital seperti ilustrasi, desain grafis, atau animasi, kamu bisa menjual karya-karyamu di pasar digital.

Ingat, setiap *side hustle* membutuhkan komitmen dan usaha untuk berhasil. Tentu kita juga harus pandai mengelola keuangan, jangan sampai sudah ada pemasukan tambahan, tetapi masih saja kurang. Tips keuangan yang harus dilakukan, yakni maksimalkan pemasukan, buat rencana keuangan bulanan, mulailah disiplin menabung, buat skala prioritas, dan catat pengeluaran secara rutin untuk melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan pribadi, apakah sudah sesuai dengan rencana pengeluaran atau justru membengkak.

Yuk, jangan takut mencoba hal-hal baru dan terus tingkatkan kualitasmu. Dengan ketekunan dan kerja keras, kesempatan meraih sukses dalam *side hustle* tanpa modal besar akan semakin dekat.

# Yuk, Rasakan Manfaat Tabungan Haji untuk Tunaikan Rukun Islam ke-5

Setiap umat Islam pasti memiliki impian berkunjung ke kota Makkah, untuk menunaikan rukun Islam kelima, yakni naik haji. Namun, dalam mewujudkan pelaksanaan ibadah Haji tentunya diperlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menabung.



**B**iaya untuk menunaikan ibadah Haji sendiri tidaklah murah, tahun 2024, pemerintah Indonesia telah menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp56.000.000. Maka, salah satu produk perbankan yang dapat membantu dalam mewujudkan impian menunaikan ibadah Haji adalah tabungan Haji syariah.

Tabungan Haji syariah memiliki banyak insentif serta manfaat bagi para nasabah. Beberapa perbankan syariah memberikan syarat setoran awal yang ringan, serta setoran bulanan juga dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah. Produk tersebut juga telah memiliki sistem yang sudah terkoordinasi secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.

Tujuan utama tabungan Haji syariah adalah mengumpulkan dana untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan, setelah itu nasabah dapat melanjutkan menabung setiap bulannya agar dapat mencapai nominal yang cukup untuk memenuhi biaya Haji pada hari H keberangkatan.

Selain melalui tabungan Haji syariah, calon jamaah juga bisa membuka tabungan Haji di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Sebelum memutuskan bank mana yang dipilih, jangan lupa cek dulu ya, apakah bank tersebut benar telah terdaftar sebagai BPS BPIH pada situs <https://Haji.kemenag.go.id/>.

Untuk mulai memanfaatkan fasilitas tabungan Haji, ketentuan yang diberlakukan memang berbeda pada setiap bank. Namun, tak perlu khawatir, seluruh ketentuan tersebut tidak akan menyulitkan, melainkan memberikan manfaat untuk

mewujudkan impianmu berangkat Haji. Yuk, daftar Haji dengan lakukan prosedur di bawah ini:

1. Nasabah/ calon jamaah Haji membuka tabungan Haji di bank. Calon nasabah cukup membawa katu identitas seperti KTP/SIM bagi WNI; KIMS/ KITAS dan Paspor bagi WNA (setoran awalnya ringan, dan nasabah pun bebas menentukan setoran rutin).
2. Jika saldo sudah mencukupi ( $\pm$ Rp25.000.000) dan sudah didaftarkan oleh bank melalui SISKOHAT, calon jamaah Haji agar melakukan pendaftaran Haji di Kantor Kemenag wilayah setempat (sesuai KTP calon jamaah Haji) dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kemenag.
3. Petugas Kantor Kemenag melakukan registrasi data calon jamaah Haji di SISKOHAT.
4. Setelah melakukan registrasi maka nasabah mendapatkan lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang sudah ditandatangani oleh pejabat Kemenag.
5. Nasabah membawa SPPH ke bank tempat membuka rekening tabungan Haji untuk mendapatkan nomor porsi Haji.
6. Calon jamaah memasuki masa tunggu keberangkatan Haji sesuai dengan regulasi Kemenag.

Tabungan Haji sebaiknya hanya digunakan untuk keperluan berangkat ke tanah suci saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kondisi yang membuat seseorang tidak bisa berangkat, seperti karena sakit atau meninggal dunia.

Dalam kondisi ini, keluarga bisa memutuskan untuk mengubah jamaah yang berangkat, misalnya diganti ibu

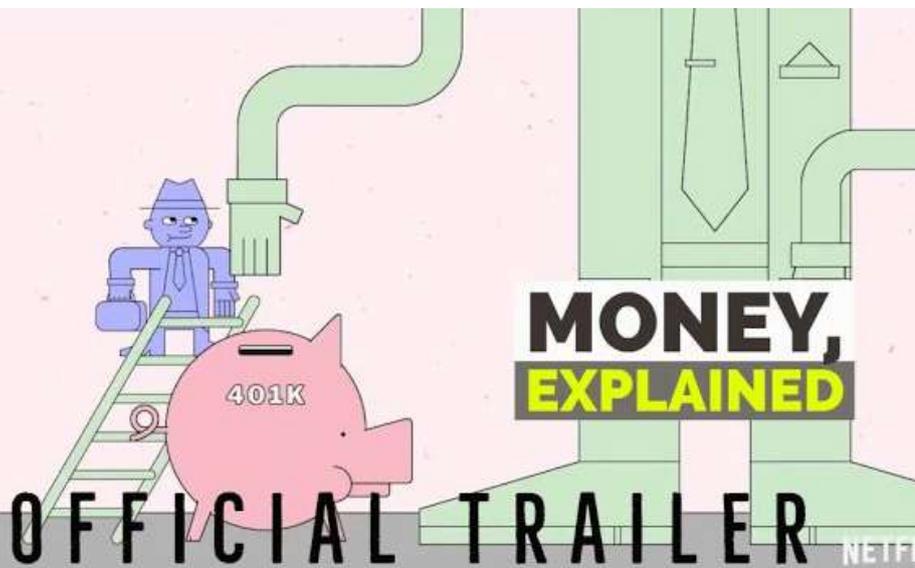
atau anak pertama. Dengan begitu tabungan Haji akan tetap berguna sebagaimana mestinya.

Namun ada juga kondisi yang memaksa jemaah membatalkan keberangkatan dan mengambil kembali dana yang ada di tabungan Haji. Terkait hal ini, Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Hurriyah El Islamy pada tahun 2021 silam sudah menegaskan bahwa uang dalam tabungan Haji bisa diambil.

Tunggu apa lagi? Mulailah nabung dari sekarang, dan wujudkan impian beribadah Haji tanpa rasa gundah bersama tabungan Haji!

Upaya menabung untuk beribadah Haji terlihat sederhana, namun terkadang banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya. Berikut merupakan beberapa tips untuk memulai menabung dengan tabungan Haji syariah.

- Jadikan niat beribadah sebagai motivasi utama untuk menabung, dengan demikian calon jamaah memiliki dasar yang kuat, sehingga menabung akan terasa ringan.
- Konsistensi dalam menabung sangat penting, hal ini juga merupakan upaya untuk memiliki disiplin keuangan.
- Tingkatkan usaha dan kinerja untuk memperoleh pendapatan lebih atau tambahan dana yang dapat digunakan untuk menabung.
- Kurangi pos pengeluaran yang tidak penting dan alihkan untuk menabung.



## Film Money Explained, Kenali Lebih Dalam Tentang Uangmu

**Uang acapkali menjadi sumber kebahagiaan manusia. Namun, uang juga memiliki sisi gelapnya, menjadi alasan munculnya masalah dalam kehidupan seseorang. Apa yang sebenarnya kita lakukan dengan uang?**

**O**Secara umum, uang sebagai alat tukar menukar digunakan untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Uang bukan hanya sebagai kebutuhan untuk memenuhi transaksi jual beli saja, tetapi bisa dijadikan sebagai alat pengontrol emosi. Seseorang yang memiliki uang yang cukup banyak akan mudah untuk membeli hal-hal di luar kebutuhan seperti hobi mengoleksi sepatu, membeli perangkat elektronik, dan lain sebagainya. Keinginan yang mudah untuk dimiliki itu akan membuat diri sendiri bahagia.

Lalu kapan sisi gelap uang muncul yang membuat manusia terseret dalam masalah? Sebuah film serial dokumenter dari layanan menonton *streaming*, mengulik tuntas mengenai sisi kelam uang. Menyoroti bagaimana uang dapat menjadi sebuah petaka bagi seseorang. Serial dokumenter berjumlah 5 episode dengan durasi 22 menit tiap episode ini, mengangkat cerita tentang keuangan dari kartu kredit, penipuan keuangan, pinjaman pelajar, dana pensiun hingga perjudian.

Penonton akan diajak untuk

melihat sisi negatif uang yang kerap tidak disadari oleh masyarakat. Mulai dari isu tentang perjudian dalam *day trading*, skema penipuan cepat kaya, eksperimen perusahaan kartu kredit yang kerap melakukan upaya-upaya tidak wajar untuk mencari keuntungan maksimal dari setiap individu, hingga isu-isu besar lainnya di dunia keuangan.

Dalam episode tentang isu kartu kredit, penonton bisa belajar bagaimana cara menghindari potensi merugikan yang mengarah pada utang yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita diajak untuk memahami sistemnya secara mendalam. Episode lainnya juga mengupas topik menarik yakni tentang skema cepat kaya, di mana masalah ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Episode ini membahas tentang mengapa orang-orang terus terjebak dengan penipuan finansial. Termasuk membahas penipuan lewat perangkat digital.

Puncaknya, episode terakhir membahas topik yang dapat menyadarkan generasi muda agar mampu mengelola keuangannya dengan lebih bijak. Episode terakhir berjudul 'Retirement,' menyoroti bagaimana cara kerja sistem dana pensiun modern. Pesan moralnya sangat terbaca jelas, episode ini mengajak generasi muda mulai menabung dari sekarang sebelum terlambat.

Serial dokumenter *Money Explained* dikemas menggunakan animasi, narator selebriti, dan wawancara ahli untuk memberikan penjelasan dengan gambaran yang mudah dicerna penonton. Bagaimana, apakah serial ini cukup membantu memahami tiap-tiap fungsi uang dan mengelolanya dengan lebih baik?



“Temukan 10 perbedaan dari 2 gambar berikut ini”

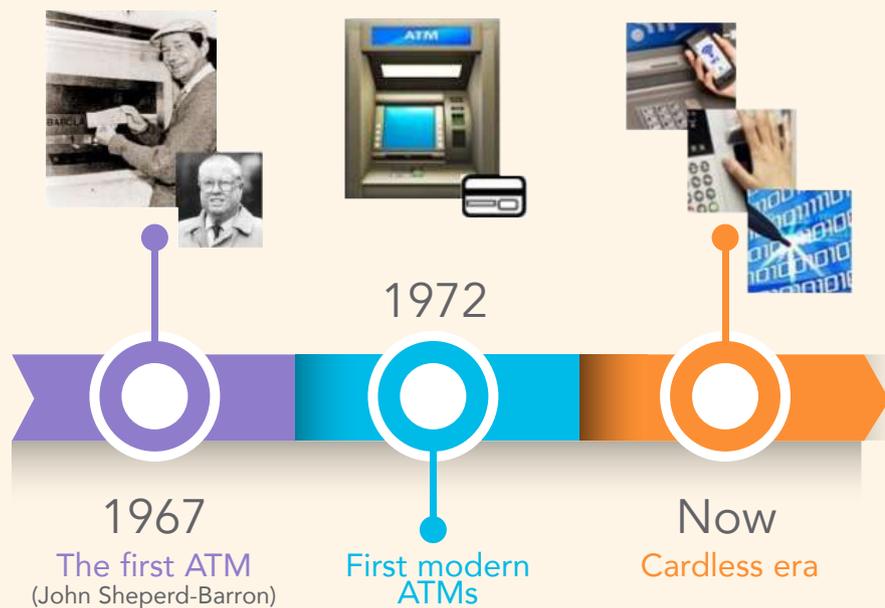


Temukan 10 perbedaan dari 2 gambar di atas dan unggah melalui Instagram Story. Jangan lupa mention @Sikapiuangmu

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

# Evolusi ATM dari Waktu ke Waktu

Terbayang tidak jika kita hidup tanpa ATM? Pasti akan susah ya bertransaksi di era modern saat ini yang serba praktis dan cepat. Kira-kira seperti apa wujud mesin ATM zaman dahulu saat pertama kali muncul ya?



**A**njungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi benda yang tidak bisa dipisahkan di kehidupan masa kini. Betapa tidak, kehadiran ATM membuat nasabah tak perlu repot-repot antre untuk melakukan transaksi perbankan, seperti menabung dan transfer.

Sejak kemunculannya 50 tahun yang lalu, pada tahun 1967. Bagi banyak orang, ATM menjadi bukti nyata bahwa perbankan sedang mengalami perubahan atau berevolusi. ATM menandai awal dari perbankan digital kontemporer. Beberapa mengklaim penemuan *cashpoint* ini, termasuk John Shepherd-Barron dan James Goodfellow di Inggris; Don

Wetzel dan Luther Simjian di Amerika Serikat; dan bahkan perusahaan teknik seperti De La Rue, Speytec-Burroughs, Asea-Metior, dan Omron Tateisi. Tetapi ATM merupakan teknologi yang cukup kompleks. Bahkan, disinyalir bahwa tidak ada satupun momen yang pasti yang menjadi penanda lahirnya ATM.

Kondisi sebaliknya justru terjadi di negara kita. Euforia kehadiran ATM di Indonesia sekitar tahun 80-an, kurang disambut baik. Bank-bank terkemuka enggan untuk memasang ATM. Alasannya, investasi ATM dianggap sebagai pemborosan. Saat itu, bank yang hendak memiliki ATM harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 100 juta. Bank tersebut juga berkewajiban

mengeluarkan biaya tambahan untuk petugas yang mengawasi ATM. Hal tersebut terjadi dikarenakan sejumlah ATM dilaporkan rusak akibat kurangnya pengetahuan dari pengguna.

Namun, sebuah bank lokal di Denpasar, Bali, tetap antusias menghadirkan ATM sekitar tahun 1984/1985 untuk kemudahan nasabahnya yang tidak nyaman dengan antrean *teller*. Disusul berikutnya tahun 1986, dua bank swasta mulai menempatkan ATM di cabang-cabang mereka. Baru akhirnya tahun 1988, bank swasta terkemuka mulai yakin dengan kemudahan teknologi mesin ATM.

Inovasi mesin ATM pun terus mengikuti perkembangan zaman. Mesin yang selama ini dikenal sebagai '*hole in the wall*' karena selalu menempel di tembok, kini sudah banyak versi *mobile*-nya. Namun, masalah utama dari semua mesin ATM sejak dulu sama: keamanan. Oleh karena itu bank dan regulator keuangan terus berinovasi memperbaiki sistem keamanannya.

Selain memakai konsep *Personal Identification Number* (PIN), penggunaan ATM juga sudah memakai teknologi *face recognition* atau pengenalan wajah. Jadi mesin ATM bakal lebih sulit diretas orang yang berniat jahat. Era digital pun ikut mengubah wajah mesin ATM dari sisi keamanan dan kenyamanan penggunaannya. Kini banyak ATM menawarkan fitur *cardless* atau tanpa kartu dengan bantuan berbagai aplikasi yang terpasang di ponsel pengguna/nasabah.

## “Yuk, Persiapkan Keuangan untuk Tahun Ajaran Baru Bareng Keluarga Sikapi”





# INDONESIA SHARIA FINANCIAL OLYMPIAD 2024

Sharia Smart Generation for Brighter Futures

## CERDAS CERMAT Keuangan SYARIAH

Kategori Peserta  
Pelajar SMA Sederajat  
& Mahasiswa

Periode Pendaftaran  
24 Juni - 26 Juli 2024

## WIRAUSAHA MUDA SYARIAH

Kategori Peserta  
Mahasiswa

Periode Pendaftaran  
24 Juni - 21 Juli 2024

Daftarkan dirimu dan raih kesempatan untuk memenangkan total hadiah  
**Ratusan Juta Rupiah**



Link  
Pendaftaran  
[linktr.ee/ISFO2024](https://linktr.ee/ISFO2024)



Guide Book  
ISFO 2024  
[bit.ly/GuidebookISFO2024](https://bit.ly/GuidebookISFO2024)